

# BAB I

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu persyaratan yang tidak dapat kita hindarkan di era reformasi. Reformasi birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan pembangunan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan kewenangan yang makin luas diberikan kepada daerah di era otonomisasi ini, daerah memiliki kesempatan untuk melakukan berbagai hal dalam rangka memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun harus dipertanggungjawabkan apa yang diperbuat sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/ 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan serta perannya dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam kaitan itu untuk terwujudnya upaya menciptakan pemerintah daerah yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan, maka Walikota Ambon selaku kepala daerah menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden Republik Indonesia dan kepada rakyat sebagai media pertanggungjawaban publik.

## **A.GAMBARAN UMUM KOTA AMBON**

### **1. Kondisi Geografis.**

#### **a. Luas, Letak dan Batas Wilayah**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979, luas Kota Ambon adalah 377 Km<sup>2</sup> atau 2/5 dari luas wilayah pulau Ambon. Berdasarkan hasil survey Tata Guna Tanah Tahun 1980 luas daratan kota Ambon tercatat 359,45 Km<sup>2</sup> dan lautan seluas 17,55 Km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 98 Km.

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2006 wilayah administratif Kota Ambon dimekarkan menjadi 5 kecamatan dari sebelumnya 3 kecamatan, yang membawahi 20 kelurahan dan 30 desa/negeri.

Tabel I.1 berikut ini memberikan gambaran tentang hasil pemekaran wilayah administrasi Kota Ambon sesuai Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 tahun 2006 tersebut di atas.

**Tabel 1.1**  
**Keadaan Wilayah Administrasi**  
**Kota Ambon Hasil Pemekaran**

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa/Kelurahan		Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
			Desa/Negeri	Kelurahan	
1	Nusaniwe	Amahusu	5	8	88,35
2	Sirimau	Karang Panjang	4	10	86,82
3	T.A.Baguala	Passo	6	1	40,11
4	Leitimur Selatan	Leahari	8	-	50,50
5	Teluk Ambon	Wayame	7	1	93,67
<b>J u m l a h</b>			<b>30</b>	<b>20</b>	<b>359,45</b>

*Sumber data : Bappekot Ambon Tahun 2011*

Secara Astronomis, wilayah administrasi Kota Ambon berada antara 3° - 4° Lintang Selatan dan 128 ° – 129 ° Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Petuanan Desa Hitu, Hila dan Kaitetu dari Kecamatan Leihutu Kabupaten Maluku Tengah.
- Sebelah Selatan : Laut Banda
- Sebelah Timur : Petuanan Desa Suli dari Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
- Sebelah Barat : Maluku Tengah.

## 2. Topografi

Kondisi topografi wilayah Kota Ambon, sebagian besar terdiri dari daerah perbukitan yang berlereng terjal dan daerah dataran dengan kemiringan sekitar 10% seluas ± 55 Km<sup>2</sup> atau 15,30% dari luas daratannya. Dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dataran yang tersebar pada 5 kecamatan, maka dibuat pengelompokan wilayah tersebut ke dalam 7 lokasi sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini

**Tabel. 1.2**  
**Pengelompokan Wilayah Dataran di Kota Ambon**  
**Berdasarkan Karakteristik Wilayah**

No	Kelompok lokasi	Ketinggian (M dpl)	Kemiringan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Presentase (%)
1	Pusat Kota dan Sekitarnya	0 – 50	3,36 <sup>0</sup>	13,50	5,44
2	Rumah Tiga dan sekitarnya	0 - 50	3,18 <sup>0</sup>	4,50	5,57
3	Passo dan sekitarnya	0 – 50	3 <sup>0</sup>	14,75	4,74
4	Laha dan sekitarnya	0 – 50	3,39 <sup>0</sup>	4,25	6,18
5	Hutumuri dan sekitarnya	0 – 50	6,16 <sup>0</sup>	4,25	9,70
6	Kilang dan sekitarnya	0 – 50	5,66 <sup>0</sup>	3,50	9,91
		50- 250	6,56 <sup>0</sup>	3,25	10,30
7	Latuhalat dan sekitarnya	0 – 50	5,40 <sup>0</sup>	4,00	8,57

*Sumber data : Bappekot Ambon Tahun 2011*

## PETA AMBON

### AMBON MAP



SKALA 1 : 500.000

Keterangan/Legend :

	Kota Ambon		Gunung/Mountain
	Benteng/Fort		Bandara/Air Field
	Jalan Propinsi/Provincial Road		Batas Kecamatan
	Jalan Raya/Secondary Road		Sungai/River
	Rekreasi Pantai/Beach		

### 3. Iklim

Iklim di Kota Ambon adalah iklim tropis dan iklim musim, karena letak Pulau Ambon dikelilingi oleh laut. Sehubungan dengan itu iklim Kota Ambon sangat dipengaruhi oleh lautan dan berlangsung bersamaan dengan iklim musim, yaitu musim Barat atau Utara dan musim Timur atau Tenggara. Pergantian musim selalu diselingi oleh musim Pancaroba yang merupakan transisi dari kedua musim tersebut. Musim Barat umumnya berlangsung dari bulan Desember sampai dengan bulan Maret, dimana bulan

April merupakan masa transisi ke musim Timur. Sedangkan musim Timur berlangsung dari bulan Oktober, dimana bulan Nopember merupakan masa transisi ke musim Barat.

Kota Ambon termasuk Tipe Iklim B berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmidt dan Ferguson (1951) yang dicirikan oleh rataan bulan kering (curah hujan < 60 mm) adalah 1,67 bulan dan bulan basah (curah hujan > 100 mm) adalah 9,58 bulan dengan nilai Q sebesar 17,4 %.

Gambar Grafik.....

Sumber: Stasiun Meteorologi Ambon tahun 2005-2009, dari BPS Kota Ambon, 2010

Gambar 1.3. Curah Hujan di Kota Ambon Tahun 2005 - 2009

Berdasarkan data curah hujan tahun 2005-2009 bersumber dari stasiun

Meteorologi Ambon melalui BPS (Gambar 1.3.), curah hujan tertinggi tahunan masih terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 5.710 mm dengan 276 hari hujan. Mengacu pada rata-rata curah hujan bulanan tahun 2003 – 2009, maka bulan basah (musim hujan) dengan curah hujan di atas 200 mm terjadi pada bulan April hingga Juli seiring dengan berlangsungnya Musim Timur dengan curah hujan tertinggi di bulan Juni (609,79 mm), sedangkan bulan kering (musim panas) dengan curah hujan di bawah 200 mm terjadi dari bulan Agustus hingga Maret seiring dengan berlangsungnya Musim Barat dengan curah hujan terendah di bulan November (81,96 mm). Dari data tahun 2003-2009, maka curah hujan di tahun 2008 lebih tinggi dibanding tahun-tahun yang lain, merupakan efek pemanasan global yang terjadi di seluruh dunia dan telah dirasakan dampaknya di Kota Ambon. Selain itu pada tahun 2009, curah hujan tertinggi bulanan terjadi di bulan Februari sebesar 980 mm, padahal rata-rata curah hujan bulan Februari

selama tahun 2003-2009 adalah 237,19 mm. Sementara itu berdasarkan data Stasiun Meteorologi Ambon tahun 2004-2009, maka rata-rata temperatur di Kota Ambon adalah 26,49 °C dengan kisaran suhu minimum adalah 24,12 °C dan suhu maksimum 29,44 °C; rata-rata kelembaban nisbi sekitar 82,89%; rata-rata lama penyinaran matahari adalah 46,42% dan rata-rata tekanan udara adalah 1.010,74 MB.

#### 4. Demografi

##### a. Jumlah Penduduk

Kota Ambon dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Provinsi sekaligus berfungsi sebagai pusat aktivitas sosial, ekonomi, pemerintahan serta pendidikan tinggi di Provinsi Maluku, membawa pengaruh pada pertumbuhan penduduk, terkait dengan migrasi, ke Kota Ambon dari daerah-daerah sekitar.

Penduduk Kota Ambon pada tahun 2009 berjumlah 350.604 jiwa atau 81.138 Kepala Keluarga. Jika dibandingkan penduduk tahun 2008 sejumlah 302.095 jiwa, maka di tahun 2009 jumlah penduduk Kota Ambon mengalami pertumbuhan sebesar 16,06 % menjadi 350.604 jiwa. Sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini..

Kondisi ini terlihat pada perkembangan jumlah penduduk dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2007 – tahun 2009) sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1.3**  
**Distribusi Penduduk Berdasarkan Kecamatan**  
**dari Tahun 2007– 2009**

No	Kecamatan	PENDUDUK (JIWA)		
		2007	2008	2009
1	Nusaniwe	82.760	95.366	102.078
2	Sirimau	105.010	108.724	145.984
3	Teluk Ambon Baguala	47.149	48.487	49.706
4	Teluk Ambon	27.990	38.858	43.195
5	Leitimur Selatan	9.063	10.660	9.641
<b>Jumlah</b>		<b>271.972</b>	<b>302.095</b>	<b>350.604</b>
<b>Pertumbuhan (%)</b>		<b>3,35</b>	<b>11,08</b>	<b>16,06</b>

*Keterangan: Sumber data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon*

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan Kepadatan Penduduk**  
**Tiap Kecamatan Tahun 2009**

No	Kecamatan	Luas Wilayah Daratan (Km <sup>2</sup> )	Jumlah KK	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa Km <sup>2</sup> )
1	Nusaniwe	88,35	23,590	102,078	1,155
2	Sirimau	86,82	33,254	145,984	1,681
3	Teluk. A. Baguala	40,11	11,777	49,706	1,239
4	Leitimur Selatan	50,50	2,368	9,641	191
5	Teluk Ambon	93,67	10,149	43,195	461
<b>Kota Ambon 2009</b>		<b>359,45</b>	<b>81,138</b>	<b>350,604</b>	<b>975</b>
<b>Kota Ambon 2008</b>		<b>359,45</b>	<b>-</b>	<b>302,095</b>	<b>840</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon 2010

**b. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

Jumlah penduduk Kota Ambon pada tahun 2009 berjumlah 350.604 jiwa atau 81.138 Kepala Keluarga. Dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat di kecamatan Sirimau sebesar 145,984 jiwa dengan kepadatan 1,681 jiwa / Km<sup>2</sup>, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di kecamatan Leitimur Selatan sebesar 9,641 jiwa dengan kepadatan 191 jiwa / Km<sup>2</sup>. Jika dibandingkan penduduk tahun 2008 sejumlah 302.095 jiwa, maka di tahun 2009 jumlah penduduk Kota Ambon mengalami pertumbuhan sebesar 16,06 % menjadi 350.604 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki 176,325 jiwa (50,29 %) dan penduduk perempuan 174,279 jiwa (49,71 %). Penyebaran penduduk menurut jenis kelamin di setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.5. di bawah ini

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tiap Kecamatan**  
**Tahun 2009**

No	Kecamatan	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Nusaniwe	50.559	51.519	102.078
2	Sirimau	73.299	72.685	145.984
3	T.A.Baguala	25.489	24.217	49.706
4	Leitimur Selatan	4.793	4.848	9.641
5	Teluk Ambon	22.183	21.010	43.195
<b>Kota Ambon 2009</b>		<b>176.185</b>	<b>174.279</b>	<b>350.604</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, 2010



### **c. Struktur Usia**

Struktur Usia penduduk Kota Ambon pada tahun 2009 berdasarkan piramida penduduk menunjukkan bahwa dari 350.604 penduduk Kota Ambon didominasi oleh penduduk usia produktif (usia 15 sampai 59 tahun) berjumlah 252.493 jiwa (70,02 %), diikuti oleh penduduk usia muda (usia 0 sampai 14 tahun) berjumlah 71.754 jiwa (20,46 %) dan penduduk usia lanjut (usia 60 tahun ke atas) berjumlah 26.357 jiwa (7,52 %).

Struktur usia penduduk Kota Ambon pada tahun 2009 untuk laki-laki berdasarkan piramida penduduk menunjukkan bahwa dari 176.325 penduduk laki-laki Kota Ambon, didominasi oleh penduduk usia produktif (usia 15 sampai 59 tahun) berjumlah 126.604 jiwa (71,80 %), diikuti oleh penduduk usia muda (usia 0 sampai 14 tahun) berjumlah 37.375 jiwa (21,20 %), dan penduduk usia lanjut (usia 60 tahun ke atas) berjumlah 12.346 jiwa (7,00 %). Sedangkan struktur usia penduduk Kota Ambon untuk perempuan pada tahun 2009 menunjukkan bahwa dari 174.279 penduduk perempuan Kota Ambon didominasi oleh penduduk usia produktif (usia 15 sampai 59 tahun) berjumlah 125.889 jiwa (72,23 %), diikuti oleh penduduk usia muda (usia 0 sampai 14 tahun) berjumlah 34.379 jiwa (19,73 %), dan penduduk usia lanjut (usia 60 tahun ke atas) berjumlah 14.011 jiwa (8,04 %).

### **d. Pendidikan**

Sektor Pendidikan dari tahun ke tahun menunjukkan tingkat kemajuan yang cukup baik. Ini disebabkan karena ditunjang dengan berbagai infrastruktur serta akses terhadap pendidikan menjadi perhatian utama Pemerintah Kota Ambon.

Kondisi pendidikan di Kota Ambon dapat tergambar selain dengan tersedianya infrastruktur pendidikan serta ditunjang dengan perbaikan mutu guru melalui kegiatan pendidikan dan latihan, sertifikasi guru pada intinya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di daerah.

Salah satu mutu pendidikan di Kota Ambon dapat diukur melalui Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Tingkat kelulusan siswa.

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk semua jenjang pendidikan di Kota Ambon melebihi 100 % Hal ini terlihat seperti Tabel 1.6. Hal seperti ini dapat mengindikasikan adanya urbanisasi di Kota Ambon, mengingat jumlah siswa yang ada lebih tinggi dari jumlah penduduk real usia 7 – 18 tahun. Urbanisasi ini dapat disebabkan oleh masuknya penduduk ke Kota Ambon ataupun banyak pelajar di sekitar pulau Ambon dari Kabupaten Maluku Tengah, datang bersekolah di Kota Ambon.

**Tabel 1.6.**  
**Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)**  
**Siswa Kota Ambon Tahun 2007 – 2009**

No	Jenjang Pendidikan	APM (%)			APK (%)		
		2007	2008	2009	2007	2008	2009
1	SD / MI	94,08	114,73	107,84	97,95	144,61	124,15
2	SMP / MTs	87,54	90,11	98,83	100,70	110,03	127,26
3	SMA/SMK/MA	87,35	87,52	87,83	97,47	103,03	115,25

*Sumber : Dinas Pendidikan Kota Ambon, 2010*

Pada jenjang SD/MI, APK dan APM pada tahun 2009 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Jumlah APK yang mengalami penurunan disebabkan peningkatan jumlah penduduk yang signifikan dari tahun sebelumnya sebagai bilangan pembagi, sedangkan APM yang mengalami penurunan disebabkan oleh program penerimaan siswa baru pada jenjang SD / MI adalah anak yang berusia 7 tahun, yang dapat diterima sebagai siswa baru di kelas 1 SD/SMI.

Pada jenjang SMP / MTs, APK dan APM pada tahun 2009 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, seiring dengan pertumbuhan siswa pada jenjang tersebut. Sementara pada jenjang SMA /SMK / MA, APK dan APM pada tahun 2009 mengalami peningkatan, disebabkan oleh animo masyarakat dari luar Kota Ambon cukup tinggi untuk menyekolahkan anaknya di Kota Ambon. Sebagai pembandingan jumlah lulusan SMP/MTs di

Kota Ambon tahun 2009 sebanyak 4.933 siswa, sementara siswa baru yang terserap di jenjang SMA / SMK / MA di Kota Ambon tahun 2009 adalah sebanyak 6.177 siswa. Dengan demikian terdapat 1.244 siswa lain dari Luar Kota Ambon yang bersekolah di Kota Ambon.

Pada sisi lain tingkat kelulusan siswa yang mengikuti Ujian Akhir Nasional (UAN) tahun 2009 menunjukkan bahwa tingkat kelulusan di Kota Ambon untuk semua jenjang pendidikan lebih tinggi dari tingkat kelulusan Provinsi Maluku, seperti terlihat dalam tabel 1.7. berikut ini

**Tabel 1.7.**  
**Tingkat Kelulusan UAN Siswa Di Kota Ambon Tahun 2007 – 2009**

NO	Jenjang Pendidikan	Tingkat Kelulusan Kota Ambon (%)			Tingkat Kelulusan Provinsi Maluku Tahun 2009 (%)
		2007	2008	2009	
1	SD / MI	100	100	99,94	99,84
2	SMP / MTs	96,32	98,92	96,20	93,72
3	SMA / MA	95,95	93,62	94,76	89,29
4	SMK	93,99	95,66	81,39	80,07

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Ambon, 2010

Pada jenjang SD / MI, tingkat kelulusan di Kota Ambon tahun 2009 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh standar nilai kelulusan yang ditetapkan Departemen Pendidikan Nasional mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2009, standar kelulusan harus mencapai 4,25.

Begitupun pada tingkat kelulusan di jenjang SMP/MTs di tahun 2009 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh standar nilai kelulusan pada jenjang SMP / MTs mengalami peningkatan dari 4,50 di tahun 2008 menjadi 5,50 di tahun 2009.

Standar nilai kelulusan yang ditetapkan oleh Negara melalui Departemen Pendidikan Nasional mendorong siswa untuk belajar maksimal, dan mendorong sekolah untuk mempersiapkan pembelajaran secara baik.

Perkembangan pertumbuhan infrastruktur serta rasio guru murid dapat diikuti pada tabel berikut

**Tabel 1.8.**  
**Jumlah sekolah, Gedung, Murid, Guru serta Rasio Murid/Guru Tingkat Sekolah TK**  
**Tahun 2007 – 2009**

Jenjang TK	Kondisi Per Tahun		
	2007	2008	2009
Jumlah Sekolah	68	70	68
Jumlah Gedung Sekolah (Unit)	58	60	60
Jumlah Murid (orang)	3.182	3.043	2.932
Jumlah Guru PNS (orang)	145	120	116
Rasio Murid / Guru	22 : 1	25 : 1	25 : 1

*Sumber : Dinas Pendidikan Kota Ambon, 2010*

Pada tahun 2009 jumlah taman kanak-kanak di Kota Ambon sebanyak 68 sekolah yang terdiri dari TK Swasta 65 sekolah dan TK Negeri sebanyak 3 sekolah. Pada tahun 2009 terjadi pengurangan 2 sekolah TK dari tahun 2008 yaitu : (1). Taman Kanak-kanak Maria Mediatiks 1 dan 2 yang berlokasi di Jl. Nn. Saar Sopacua diregruping untuk operasionalnya menjadi 1 TK atas usulan Yayasan Bintang Timur dan (2) Taman Kanak-kanak Parakletos yang berlokasi di Desa Passo.

Pendidikan SD/MI di Kota Ambon tahun 2009 berjumlah 201 sekolah. Pada tahun 2009 terjadi regrouping 8 SD menjadi 4 SD, dan terjadi penambahan 2 SD baru.

Sekolah yang regrouping adalah : (1). SD Naskat Maria Mediatiks 1 dan 2, menjadi SD Maria Mediatiks; (2). SD Xaverius A1, A2, B, dan C, menjadi SD Xaverius A dan SD Xaverius B; serta (3). SD Naskat Ama Ori 1 dan 2 Passo, menjadi SD Naskat Ama Ori Passo. Sementara sekolah yang baru adalah : (1). Madrasah Ibtidaiyah terpadu (MIT) Ishaka di Ahuru Karang panjang dengan ijin operasional oleh Departemen Agama Nomor Kd.2503/1/PP.00/166/2007 tanggal 27 Juni 2007, dan (2). Madrasah Ibtidaiyah Stanawiyah (MIS) Al Anshor di Jl. Iman Gazali Air Besar Ahuru Karang Panjang, dengan ijin operasional oleh Departemen Agama. Sementara itu jumlah guru SD / MI pada tahun 2009 adalah 2.755 orang dan murid sebanyak 39.535 orang, sehingga rasio murid terhadap guru adalah 14 : 1, seperti Nampak pada tabel dibawah ini

Tabel 1.9.

**Jumlah sekolah, Gedung, Murid, Guru serta Rasio Murid/Guru Tingkat Sekolah SD / MI Tahun 2007 – 2009**

Jenjang SD / MI	Kondisi Per Tahun		
	2007	2008	2009
Jumlah Sekolah	201	203	201
Jumlah Gedung Sekolah (Unit)	127	135	137
Jumlah Murid (orang)	38.579	39.524	39.535
Jumlah Guru PNS (orang)	2.113	2.670	2.755
Rasio Murid / Guru	18 : 1	15 : 1	14 : 1

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Ambon, 2010

Pada tahun 2009, jumlah sekolah SMP/MTs bertambah dua sekolah yaitu : (1). MTs Terpadu Al Anzor di Ahuru Karang Panjang dan (2). MTs Ishaka di Ahuru Karang Panjang. Pengoperasian kedua sekolah dimaksud berdasarkan surat ijin operasional dari Departemen Agama. Sehingga di Kota Ambon jumlah sekolah SMP / MTs sebanyak 54 sekolah. Hal ini juga menjadi indikasi adanya peningkatan akses pelayanan pendidikan sebagaimana tergambar dalam tabel dibawah.

Tabel 1.10.

**Jumlah sekolah, Gedung, Murid, Guru serta Rasio Murid/Guru Tingkat Sekolah SMP / MTs Tahun 2007 – 2009**

Jenjang SMP / MTs	Kondisi Per Tahun		
	2007	2008	2009
Jumlah Sekolah	51	52	54
Jumlah Gedung Sekolah (Unit)	48	49	49
Jumlah Murid (orang)	16.647	17.886	18.028
Jumlah Guru PNS (orang)	1.162	1.280	1.328
Rasio Murid / Guru	14 : 1	14 : 1	12 : 1

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Ambon, 2010

Sementara itu, jumlah guru SMP / MTs pada tahun 2009 adalah 1.328 orang dan murid adalah 18.028 orang, sehingga rasio murid terhadap guru adalah 12 : 1.

Tabel 1.11.

**Jumlah sekolah, Gedung, Murid, Guru serta Rasio Murid/Guru Tingkat Sekolah SMA / SMK / MA Tahun 2007 – 2009**

Jenjang SMA / SMK / MA	Kondisi Per Tahun		
	2007	2008	2009
Jumlah Sekolah	44	44	44
Jumlah Gedung Sekolah (Unit)	41	41	41
Jumlah Murid (orang)	17.628	17.750	18.505
Jumlah Guru PNS (orang)	1.302	1.385	1.413
Rasio Murid / Guru	14 : 1	13 : 1	13 : 1

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Ambon, 2010

Mengacu pada data – data tabel di atas, maka Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah (MA) di Kota Ambon untuk tahun 2009 berjumlah 44 sekolah, menggunakan 41 gedung, dengan jumlah guru SMA / SMK / MA sebanyak 1.413 orang dengan jumlah murid sebanyak 18.505 orang, sehingga rasio murid terhadap guru adalah 13 : 1.

Secara keseluruhan data perkembangan jumlah guru PNS di Kota Ambon tahun 2009 dari jenjang TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA adalah 5.612 orang, yang terdiri dari 5.272 orang (94 %) dibiayai melalui APBD Kota Ambon, dan 240 orang (6 %) dibiayai oleh Kantor Departemen Agama Kota Ambon dan Provinsi Maluku

#### e. Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan menurut lapangan kerja di Kota Ambon pada tahun 2009 berjumlah 220.886 jiwa (63 % ) atau angkatan kerja dan bukan angkatan kerja sejumlah 129.718 jiwa (37 % ) seperti terlihat dalam tabel di bawah.

**Tabel 1.12.**  
**Jumlah Penduduk Kota Ambon**  
**Berdasarkan Kegiatan Utama Tahun 2009**

No	Kegiatan Utama	Jumlah
1.	<b>Angkatan Kerja</b>	<b>220.886</b>
	a. Bekerja	97.992
	b. Belum Bekerja	122.894
2.	<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>129.718</b>
	a. Sekolah	80.394
	b. Mengurus Rumah Tangga	42.993
	c. Lainnya	6.331
	<b>Jumlah Penduduk Usia Kerja</b>	<b>350.604</b>

Namun demikian penduduk yang real bekerja dalam angkatan kerja di Kota Ambon berjumlah 97.992 jiwa (28 % penduduk Kota Ambon), sedangkan belum bekerja / pengangguran terbuka berjumlah 122.894 jiwa (35 % penduduk Kota Ambon), dengan demikian jika membandingkan jumlah penduduk bekerja terhadap jumlah seluruh penduduk Kota Ambon tahun 2009, maka rasio ketergantungan adalah 1 berbanding 3,6 artinya setiap penduduk yang bekerja menanggung 3,6

jiwa penduduk yang tidak bekerja (belum bekerja / pengangguran terbuka dan bukan angkatan kerja).

#### **f. Kesehatan**

Pembangunan bidang kesehatan selama Tahun 2009 pada intinya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat yang layak bagi masyarakat sehingga dapat mewujudkan **“Ambon Sehat 2010”**. Untuk mendorong terwujudnya tujuan tersebut, Pemerintah Kota Ambon telah membangun, memperbaiki dan menyediakan berbagai fasilitas pelayanan yang didukung dengan ketersediaan sarana penunjang, obat-obatan yang bermutu maupun tenaga pelayanan kesehatan. Kestinambungan dan keberlanjutan pembangunan kesehatan tersebut lebih diprioritaskan atau difokuskan untuk pelayanan pencegahan (Preventif) dan penyuluhan (Promotif) dengan tidak mengabaikan tindakan pengobatan (kuratif) dan pemulihan (Rehabilitasi) kepada masyarakat.

Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan dapat terlihat dari tingkat kelayakan hidup sehat masyarakat yang berukur dari berbagai indicator kesehatan seperti angka kematian (mortalitas), angka kesakitan (morbilitas), peningkatan status gizi masyarakat maupun indicator-indikator lainnya. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan kesehatan menuju Ambon sehat 2010, maka selama tahun 2009 Pemerintah Kota Ambon telah melakukan kerja sama dengan Departemen Kesehatan berupa pemberian bantuan operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya kepada masyarakat melalui dana bantuan sosial (Bansos) untuk operasional Posyandu khususnya operasional Kader Posyandu, yang diperuntukan bagi 25 Desa/Kelurahan yang memiliki Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) tersebar pada 5 kecamatan, Operasional Desa Siaga yang diperuntukan bagi 50 Desa/Kelurahan dalam rangka pengembangan pembentukan dan pembinaan Desa Siaga untuk berperan aktif dalam rangka menurunkan

angka kematian bayi dan ibu bersalin, serta menanggulangi berbagai persoalan kesehatan yang ditimbulkan oleh lingkungan, Bantuan sosial gizi diperuntukan bagi kader Posyandu di 264 Posyandu dan 22 petugas Gizi Puskesmas dalam rangka pemantauan status gizi masyarakat di 50 Desa/Kelurahan di Kota Ambon, Bantuan sosial pelayanan kesehatan Daerah terpencil diperuntukan bagi masyarakat di wilayah pelayanan Puskesmas Kilang (meliputi 5 Desa yaitu Naku, Kilang, Ema, Hatalae dan Hukurila). Kegiatan yang dilaksanakan adalah (1). Pembinaan teknis kepada petugas kesehatan, (2). Skrening imunisasi bayi dan ibu hamil, (3). Pemantauan status gizi masyarakat, PMO TB, Kusta dan Malaria, (4). Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), (5). Pemeriksaan kesehatan di Posyandu Balita dan Usia Lanjut serta (6). Puskesmas keliling. Selain itu dalam program jaminan kesehatan masyarakat maka telah dilaksanakan Pelayanan kesehatan dasar kepada 46.605 peserta Jamkesmas atau 65 % dari peserta, Pelayanan Kesehatan Rujukan telah diberikan kepada 2.840 kasus yang dirujuk ke Rumah Sakit dengan berbagai kasus penyakit, Pelayanan Persalinan telah diberikan kepada 602 ibu hamil atau 33 % dari ibu hamil pemegang kartu Jamkesmas dan Operasional dan Manajemen Puskesmas termasuk kegiatan penunjang lainnya telah dilaksanakan di 22 Puskesmas dan jaringannya, dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan, baik di dalam maupun di luar Puskesmas.

Sementara kerja sama yang dilakukan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku meliputi : (a). Pembangunan Puskesmas Perawatan (Rawat Inap) di desa Hutumuri, Kecamatan Laitimur Selatan, dan Pengadaan 1 paket peralatan Puskesmas Perawatan, (b). Monitoring dan Evaluasi Program Jamkesmas di Kota Ambon, (c). Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan kegiatan berupa : (1). Pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas, (2). Pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan berkompeten di fasilitas kesehatan.



### g. Sosial

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran untuk menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di suatu daerah. IPM terdiri dari 3 komponen, yaitu (1) kesehatan, menggambarkan angka harapan hidup; (2) pendidikan menggambarkan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah; serta (3) ekonomi, menggambarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita.

**Tabel 1.13.**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ambon**  
**Menurut Komponen Tahun 2004 – 2008**

No	Indikator IPM	Kota Ambon					Provinsi Maluku
		2004	2005	2006	2007	2008	2008
1	Angka Harapan Hidup (Tahun)	72,3	72,3	72,40	72,66	72,70	67,00
2	2.1. Angka Melek Huruf (%)	98,0	98,2	98,62	99,19	99,19	98,12
	2.2. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	10,7	10,9	10,90	11,09	11,09	8,60
3	Rata-rata pengeluaran Riil per Kapita (Ribu Rp.)	616,1	619,7	622,9 7	629,06	633,9 1	605,02
Indeks Pembangunan Manusia		75,7	76,2	76,58	77,46	77,86	70,38
Peringkat Secara Nasional		13	13	11	8	9	19

IPM Kota Ambon dari tahun 2004 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada tabel 1.13 di atas. Pada tahun 2004, IPM Kota Ambon adalah 75,7 dan berada pada peringkat 13 Kota / Kabupaten secara nasional di Indonesia. Pada tahun 2008, IPM Kota Ambon adalah 77,86 dan berada pada peringkat 9 Kota / Kabupaten secara nasional di Indonesia.

IPM Kota Ambon tahun 2008 bila dibandingkan dengan IPM Provinsi Maluku tahun 2008, menunjukkan bahwa semua indikator IPM Kota Ambon berada di atas IPM Provinsi Maluku. IPM Provinsi Maluku sendiri pada tahun 2008 berada pada peringkat 19 Nasional dari 33 Provinsi di Indonesia.

## **h. Kondisi Ekonomi**

### **a. Potensi Keunggulan Daerah .**

#### **1) Potensi Kelautan**

Wilayah perairan Kota Ambon memiliki sumberdaya perikanan yang sangat potensial ditinjau dari besaran stok maupun peluang pemanfaatan dan pengembangannya. Sektor perikanan mempunyai potensi yang strategis mengingat kondisi geografis Kota Ambon sebagai kota di pulau kecil yang dikelilingi dengan teluk dan pesisir pantai. Aktivitas sector ini memegang peranan penting dalam perekonomian Kota Ambon. Sumbangan sektor perikanan pada PDRB Kota Ambon tahun 2008 (atas harga konstan tahun 2000) mencapai Rp. 244.297.780.000,- atau 87,78 % dari kontribusi Sektor Pertanian dan merupakan 15,26 % dari total PDRB Kota Ambon.

Potensi sumberdaya perikanan yang ada di Kota Ambon terdiri dari kelompok jenis ikan (fishes) dan kelompok jenis non ikan (non fishes). Sumberdaya ikan terdiri dari ikan pelagis, ikan demersal dan ikan karang. Sumberdaya non ikan antara lain udang, rumput laut, kepiting bakau, porifera, teripang dan kerang-kerangan (mollusca). Berdasarkan laporan tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Tahun 2009, total potensi kelompok ikan adalah 102.246,3 ton / tahun, dengan potensi lestari adalah 51.123,15 ton / tahun. Sedangkan total potensi kelompok non ikan yang ada adalah 122.695,6 ton.

Aktivitas perikanan di Kota Ambon didominasi oleh perikanan tangkap disamping perikanan budidaya yang akhir-akhir ini mulai berkembang dengan sumberdaya ikan sebagai potensi perikanan unggulan. Sumberdaya ikan ini meliputi ikan pelagis, ikan demersal dan ikan karang. Berdasarkan laporan tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon tahun 2009 kelimpahan stock

ikan pelagis di Kota Ambon adalah 2.091,3 ton/bulan, dengan nilai potensi lestari mencapai 1.045,7 ton / bulan. Pemanfaatan ikan pelagis ini mencapai 359,1 ton/bulan atau 34 % dari potensi lestari. Dengan demikian peluang pemanfaatan ikan pelagis di perairan Kota Ambon adalah 686,6 ton/bulan (66 %) dari potensi lestarnya. Distribusi kelimpahan stock dan potensi lestari ikan pelagis terbesar berada pada wilayah perairan selatan Kota Ambon. Kelimpahan stock ikan pelagis meliputi ikan pelagis besar dan ikan pelagis kecil. Kelimpahan stock ikan pelagis besar (tuna dan cakalang) sementara kelimpahan stock untuk ikan pelagis kecil tersebar di Teluk Ambon Dalam, Teluk Ambon Luar, Teluk Baguala dan perairan Selatan Kota Ambon. Spesies ikan pelagis kecil yang telah dimanfaatkan adalah ikan teri/puri (*Stolephorus* spp dan *Encrasicholime* spp), tembang/make (*Sardinella* spp), laying/momar (*decapterus* spp), tongkol/komu (*Auxis thazaad*), kembung/lema (*Rastreliger* spp), peperek (*Leiognathus* spp), lompa (*Thryssa* spp) dan ikan terbang (*Cypselurus* spp).

Kelimpahan stock ikan demersal di Kota Ambon adalah 240,2 ton/bulan, dengan nilai potensi lestari mencapai 120,1 ton/bulan. Pemanfaatan ikan demersal ini mencapai 35,9 ton/bulan atau 30 % dari potensi lestari. Dengan demikian peluang pemanfaatan ikan demersal di perairan Kota Ambon adalah 84,2 ton/bulan (70 %) dari potensi lestarnya. Potensi sumberdaya ikan demersal terbesar terdapat pada perairan selatan Kota Ambon dengan kelimpahan stock mencapai 180,1 ton/bulan dan peluang pemanfaatan adalah 79,9 ton/bulan. Spesies ikan demersal yang terdapat di perairan Teluk Ambon Dalam antara lain ikan kakap (*Lutjanus* spp), biji angka (*Parupeneus* spp), dan lentjam (*Lethrinus* spp). Untuk wilayah perairan Teluk Ambon Luar, spesies ikan demersal yang potensial dalam hal pemanfaatan dan sasaran

pengembangannya adalah ikan kakap merah (*Etelis* spp, *Lutjanus* spp), Silapa (*Pristipomoides* spp) kerapu (*Epinephelus* spp, *Cephalopholis* spp), Napoleon ((*Cheilinus undulates*), dan biji nangka (*Parupeneus* spp, *Mulloidichthys* spp), Spesies ikan demersal yang potensial untuk perairan Teluk Baguala adalah ikan Silapa (*Pristipomoides* spp), kakap merah (*Lutjanus* spp), dan kerapu (*Epinephelus* spp dan *Cephalopholis* spp). Spesies ikan demersal yang memiliki potensi pengembangan sangat besar di wilayah perairan selatan Kota Ambon relatif sama dengan perairan Teluk Ambon Luar dan Teluk Baguala.

Jenis ikan karang yang ada di perairan Kota Ambon meliputi ikan karang konsumsi dan ikan karang hias. Potensi sumberdaya ikan karang konsumsi di Kota Ambon adalah 22,7 ton/ha, dengan nilai potensi lestari mencapai 11,35 ton/ha. Pemanfaatan ikan karang konsumsi ini mencapai 2,27 ton/ha atau 20 % dari potensi lestari. Dengan demikian peluang pemanfaatan ikan karang konsumsi di perairan Kota Ambon adalah 9,08 ton/ha (80 %) dari potensi lestarnya. Potensi sumberdaya ikan karang konsumsi terbesar terdapat pada perairan selatan Kota Ambon dengan potensi mencapai 9,7 ton/ha dan peluang pemanfaatan adalah 3,88 ton/ha. Potensi sumberdaya ikan karang hias di Kota Ambon adalah 77.128 individu/ha dengan nilai potensi lestari mencapai 38.564 individu/ha. Pemanfaatan ikan karang hias ini mencapai 7.713 individu/ha atau 20 % dari potensi lestari. Dengan demikian peluang pemanfaatan ikan karang hias di perairan Kota Ambon adalah 30.851 individu/ha (80 %) dari potensi lestarnya. Potensi sumberdaya ikan karang hias terbesar terdapat pada Teluk Ambon Luar dengan potensi mencapai 32.376 individu/ha dan peluang pemanfaatan adalah 12.950 individu/ha. Sementara itu produksi ikan di Kota Ambon dalam tahun 2009 adalah sebesar 23.593.10

ton, yang tersebar pada 5 kecamatan meliputi : Kecamatan Nusaniwe sebesar 8.012,190 ton, Kecamatan Sirimau sebesar 6.100,00 ton, Kecamatan Teluk Ambon sebesar 4.756,00 ton, Kecamatan Teluk Ambon Baguala sebesar 1.080.00 ton dan Kecamatan Leitimur Selatan sebesar 3.644,00 ton.

## **2) Potensi Pertambangan**

Di Kota Ambon sampai saat ini hanya memiliki 1 (satu) jenis bahan tambang yaitu bahan galian C yang dieksploitasikan terdiri dari :

- Batuan Andesit terdapat di kecamatan Teluk Ambon Baguala.
- Pasir dan Kerikil terdapat di daerah pantai dan sungai di Kecamatan Teluk Ambon Baguala dan Kecamatan Nusaniwe.
- Batuan Terumbu Koral terdapat di Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Sirimau dan Kecamatan Teluk Ambon Baguala.

## **3) Potensi Pertanian**

Potensi sumber daya pertanian di Kota Ambon sampai dengan tahun 2007 yang menunjukkan bahwa luas tanah kering adalah 35.944,62 Ha. Dari luas tersebut yang potensial untuk dikembangkan bagi usaha pertanian sebesar 28.343,72 Ha, dan telah dikembangkan seluas 1.253,72 Ha, sedangkan yang diusahakan bukan untuk pertanian sebesar 7.600,90 Ha. Dan berdasarkan kondisi geografis serta potensi lahan yang ada, ternyata usaha pertanian rakyat yang cocok untuk dikembangkan mengarah pada pengembangan tanaman pangan dan hortikultura.

Dengan luas lahan usaha yang tersedia, maka pada tahun 2007 produksi tanaman palawija Kota Ambon tercatat sebagai berikut : Ubi kayu sebanyak 5.210,64 ton, Ubi Jalar 497,39 ton, Kacang Tanah 143,39 ton dan Jagung 256,09 ton. Produkai seluruh tanaman palawija tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun –tahun sebelumnya, kenaikan tertinggi

terjadi pada komoditi jagung sebesar 26,90 persen, jika dilihat perkecamatan, maka untuk komoditi ubi kayu Kecamatan Nusaniwe memberikan kontribusi terbesar yakni 34,38 %, sedangkan untuk komoditi kacang tanah kontribusi terbesar diberikan oleh Kecamatan Leitimur Selatan sebesar 32,44 % sementara komoditi jagung Kecamatan Teluk Ambon yang memberikan kontribusi terbesar yakni 38,17 %

Sementara produksi tanaman hortikultura di kota Ambon sesuai data terakhir tahun 2007 tercatat buah-buahan 2.016,47 ton, sayur- sayuran 6.204,55 ton. Dan bumbu-bumbuan 130,66 ton, Masing-masing meningkat sebesar 9,31 persen, 18,81 persen dan 1,73 persen dari tahun sebelumnya.

#### **4) Potensi Peternakan**

Untuk tahun 2007 jumlah populasi ternak yang tercatat pada Dinas Kehutanan Pertanian dan Peternakan Kota Ambon dapat dirinci sebagai berikut :

- Ternak besar yaitu sapi 631 ekor
- Ternak kecil yaitu kambing 745 ekor dan babi 1.151 ekor
- Unggas yaitu itik 837 ekor dan ayam kampung 41.373 ekor.

Meningkatnya kebutuhan konsumsi daging oleh masyarakat pada tahun 2007 jauh melebihi jumlah ternak yang tersedia maka perlu didatangkan ternak/unggas dari luar Ambon yakni untuk sapi sebanyak 772 ekor dari Maluku tengah, sedangkan Kambing sebanyak 124 ekor dan babi sebanyak 1.471 ekor, ternak unggas berupa ayam buras sebanyak 12.244 ekor sementara dari Surabaya didatangkan ayam pedaging sebanyak 16.455, untuk kebutuhan daging babi dipasok dari Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 1.272 ekor dan kerbau sebanyak 42 ekor. Dari Seram Bagian Timur didatangkan kambing sebanyak 85 ekor, sapi 790 ekor dan ayam buras sebanyak 12.947 ekor, sedangkan dari

Kabupaten Buru dipasoknya daging sapi sebanyak 746 ekor, kambing 56 ekor serta ayam buras sebanyak 11.216 ekor, semetara Maluku Tenggara hanya dua jenis ternak yang diimpor yakni kerbau sebanyak 23 ekor dan kambing 563 ekor.

#### **5) Potensi Pariwisata**

Kota Ambon memiliki panorama indah dengan obyek wisata (alam dan budaya) yang tersebar pada 5 kecamatan baik di darat/pegunungan, pantai maupun lautan, menjadi perhatian wisatawan baik lokal maupun asing. Sampai dengan tahun 2008 tercatat 69 objek wisata di Kota Ambon, terdiri dari objek wisata alam laut sebanyak 31 objek, wisata alam darat sebanyak 13 objek wisata, objek wisata budaya upacara adat 1 objek, wisata budaya sejarah 23 objek dan wisata budaya olahraga 1 objek.

Selain potensi objek di atas, salah satu sumber potensi yang cukup menunjang kegiatan kepariwisataan daerah adalah kunjungan orang asing/wisatawan yang selama tahun 2008 berdasarkan data BPS Tahun 2009 adalah 1.694 orang, yang didominasi oleh wisatawan dari Belanda (51,35 %). Jika dibandingkan jumlah wisatawan asing yang berkunjung di tahun 2007 sebanyak 3.460 orang, maka pada tahun 2008 terjadi penurunan jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Kota Ambon.

Sementara itu, fasilitas untuk mendukung usaha pariwisata di Kota Ambon cukup tersedia. Berdasarkan data BPS Tahun 2009 di Kota Ambon terdapat 48 hotel, dimana 10 diantaranya (20,83%) adalah hotel berbintang. Hotel berbintang menyediakan 433 kamar dengan 573 tempat tidur. Hotel non berbintang menyediakan 661 kamar dengan 944 tempat tidur. Sepanjang Tahun 2008, tingkat hunian rata-rata hotel berbintang adalah 42,11%, dimana tingkat hunian tertinggi terjadi di bulan Nopember (52,07%), sedangkan tingkat

hunian terendah terjadi di bulan September (37,08%). Sementara itu tingkat hunian rata-rata hotel non berbintang adalah 40,13% dimana tingkat hunian tertinggi terjadi di bulan Mei (52,20%), sedangkan tingkat hunian terendah terjadi di bulan Oktober (31,07%).

## **6) Perdagangan dan Jasa**

Kegiatan usaha perdagangan merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam membangkitkan perekonomian di Kota Ambon. Sampai dengan tahun 2008 jumlah pedagang formal (berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan/SIUP) sebanyak 1.260 pedagang, dengan rincian pedagang kecil 861 orang, pedagang menengah sebanyak 300 pedagang dan pedagang besar sebanyak 99 orang. Bila dirinci menurut jenis usaha berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), terdapat 111 Perusahaan Terbatas (PT), koperasi 23 unit, CV 553 unit dan Fa 13 unit serta Perusahaan Perorangan (PO) 560 perusahaan. Sedangkan jumlah pedagang informal, yang tersebar pada 10 buah pasar yaitu Pasar Mardika, Pasar Arumbae, Pasar Batu Merah, Pasar Tagalaya, Pasar Lama, Pasar Pule, Pasar Victoria, Pasar Gotong Royong, Pasar Nania dan Pasar Rumah Tiga. Dari sektor perdagangan dan sektor jasa telah memberikan kontribusi bagi PDRB Kota Ambon tahun 2008 (berdasarkan harga konstan tahun 2000) masing-masing sebesar 24,31% dan 26,80%.

## **7) Perindustrian**

Sampai dengan tahun 2008, jumlah usaha formal di sektor industri tercatat 307 unit usaha industri, masing-masing industri mesin, logam dan elektro sebanyak 64 unit usaha, industri kerajinan dan umum sebanyak 46 unit usaha, industri percetakan dan kimia sebanyak 91 unit usaha, industri bahan bangunan sebanyak 19 unit usaha, industri pangan sebanyak 69 unit usaha



dan industri tekstil sebanyak 18 unit usaha dengan menyerap 1.449 tenaga kerja dan penyerapan investasi Rp.40,1 milyar

## **b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB**

### **1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).**

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, kinerja ekonomi Kota Ambon yang diukur dengan besaran PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (ADHK) terus mengalami peningkatan. Selama tahun 2008, potensi ekonomi yang ada di Kota Ambon atas dasar berlaku mencapai Rp.2.668 trilyun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp.1.600 trilyun.

Pencapaian PDRB tahun 2008 lebih tinggi dari tahun sebelumnya, sehingga pertumbuhan ekonomi pun meningkat. PDRB tahun 2008 atas dasar Harga Berlaku meningkat 14,33% dibandingkan tahun 2007 yang mencapai Rp.2.333 trilyun. Sementara PDRB tahun 2008 atas dasar Harga Konstan meningkat 5,91% dibandingkan tahun 2007 yang mencapai Rp. 1,511 trilyun. Hal ini menunjukkan telah semakin membaiknya kondisi ekonomi di Kota Ambon dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2008 atas dasar harga konstan, sektor Jasa-jasa menyumbang 26,80% bagi PDRB Kota Ambon, diikuti sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 24,31%, sektor Pengangkutan dan Telekomunikasi sebesar 19,68%, sektor Pertanian sebesar 17,38% dan diikuti oleh sektor-sektor lainnya. Hal yang sama tercermin pula pada PDRB atas dasar harga berlaku 2008, namun sumbangan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran lebih tinggi mencapai 28,04% diikuti sektor jasa-jasa sebanyak 23,70%, sektor Pertanian sebanyak 19,82%, sektor Pengangkutan dan Komunikasi mencapai 17,36% serta diikuti sektor-sektor lainnya.

Perekonomian Kota Ambon mengacu pada PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2008 menunjukkan bahwa tingginya kontribusi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran adalah karena sumbangan sub sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 25,77% yang merupakan imbas dari kegiatan perdagangan di Kota Ambon yang telah bergairah. Sementara itu penyumbang utama untuk sektor Jasa-jasa adalah sub sektor Pemerintahan Umum dan Pertanahan sebesar 22,30%. Penyumbang utama untuk sektor Pertanian adalah sub sektor Perikanan sebesar 17,61%, sedangkan penyumbang utama untuk sektor Pengangkutan dan Komunikasi adalah sub sektor Angkutan sebesar 15,48%.

## **2) Pendapatan Perkapita**

Keberhasilan pembangunan diberbagai bidang sangat berpengaruh pada pendapatan regional per kapita di Kota Ambon. Selain itu, upaya-upaya Pemerintah Kota Ambon untuk mengembangkan program-program unggulan dan pendekatan penguatan ekonomi masyarakat juga sangat berimplikasi pada peningkatan pendapatan masyarakat, dan hal ini terlihat jelas dari adanya peningkatan pendapatan domestik regional per kapita di Kota Ambon.

Pendapatan domestik regional per kapita di Kota Ambon dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2008, pendapatan perkapita Atas Dasar Harga berlaku (dengan kondisi penduduk pertengahan tahun 2008) berjumlah Rp.9.260.482 meningkat 13,58% dari tahun 2007. Namun nilai pendapatan per kapita tersebut bukan merupakan nilai riil yang diterima oleh tiap penduduk Kota Ambon saja, karena ada pelaku ekonomi yang bukan merupakan penduduk Kota Ambon tetapi menjadi pelaku bisnis di wilayah Kota Ambon dan sebaliknya ada penduduk Kota Ambon yang menjadi pelaku bisnis diluar wilayah

Kota Ambon . Jika dilihat secara riil Atas dasar harga Konstan tahun 2000, pendapatan yang diterima penduduk Kota Ambon pada tahun 2008 hanya mengalami peningkatan sebesar 4,8% dari tahun 2007 menjadi Rp.5.493.099.- Dengan demikian dapat diartikan bahwa pendapatan berdasarkan harga berlaku yang diterima penduduk Kota Ambon sebesar Rp.9.260.482.- pada tahun 2008 adalah setara dengan Rp.5.493.099.- pada tahun 2000.

### 3) Laju Inflasi.

Inflasi memberikan indikasi adanya kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus selama periode tertentu, meskipun kenaikan harga-harga tersebut tidak secara bersamaan.

Laju inflasi di Kota Ambon beragam selama tahun 2009, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.14 dibawah. Laju inflasi tertinggi di Kota Ambon terjadi di bulan Desember yaitu sebesar 3,49% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah 117,87 dan merupakan peringkat pertama inflasi tertinggi dari 66 kota di Indonesia. Dengan demikian laju inflasi kumulatif Kota Ambon tahun 2009 adalah 6,48%.

**Tabel 1.14. Inflasi Kota Ambon Tahun 2009  
Dirinci Per Bulan**

No	Bulan	Laju Inflasi Indeks Umum (%)	
		Kota Ambon	Nasional
1	Januari	1,22	0,07
2	Pebruari	0,71	0,21
3	Maret	0,32	0,22
4	April	0,40	0,31
5	Mei	0,11	0,04
6	Juni	2,71	0,11
7	Juli	1,10	0,45
8	Agustus	1,27	0,56
9	September	0,55	1,05
10	Oktober	0,76	0,19
11	Nopember	0,50	0,03
12	Desember	3,49	0,33
<b>Laju Inflasi kumulatif</b>		<b>6,48</b>	<b>2,78</b>

Inflasi secara nasional pada bulan desember 2009 adalah 0,33% dengan IHK adalah 117,03, sehingga laju inflasi kumulatif Nasional tahun 2009 adalah 2,78%. Dibandingkan dengan laju inflasi nasional (tabel 1.14), laju inflasi Kota Ambon tahun 2009 umumnya lebih tinggi dari laju inflasi nasional pada bulan Mei dan Juni dimana terjadi deflasi, serta pada bulan September dimana inflasi lebih kecil dari inflasi nasional.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik No 01/01/81 Tahun XII, 4 Januari 2010 dari BPS Provinsi Maluku, inflasi tertinggi di Kota Ambon tahun 2009 yang terjadi pada bulan Desember sebesar 3,39%, disebabkan oleh inflasi yang cukup besar pada kelompok bahan makanan sebesar 8,61%, disamping juga pada (1) kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,55%, (2) kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,41%, (3) kelompok sandang sebesar 0,54%, (4) kelompok kesehatan sebesar 0,27% serta (5) kelompok transportasi, komunikasi dan keuangan sebesar 6,15%.

Beberapa hal yang menyebabkan tingginya inflasi Kota Ambon pada bulan Desember 2009 adalah :

- a. Kondisi laut yang kurang baik, sehingga hasil tangkapan ikan oleh nelayan berkurang di pasaran, sehingga memicu kenaikan harga.
- b. Kenaikan beberapa harga bahan pokok menjelang hari Raya Natal seperti beras, telur, gula dan terigu.
- c. Kenaikan harga tiket pesawat, akibat banyaknya penumpang yang ingin berlibur karena Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

#### **4) Perkembangan Investasi**

Pembangunan daerah merupakan peran multi pihak, bukan saja Pemerintah melainkan juga peran swasta dan masyarakat. Investasi swasta dan masyarakat saat ini menjadi penting,

mengingat keterbatasan dana yang dimiliki Pemerintah maupun didorong oleh perubahan paradigma pembangunan dewasa ini dimana modal sosial (social capital), baik swasta maupun masyarakat menjadi elemen penting dalam menggerakkan pembangunan.

Investasi di Kota Ambon tahun 2008/2009, berdasarkan data BPMD Provinsi Maluku pada BPS Kota Ambon Tahun 2010, meliputi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Target Penanaman Modal Dalam Negeri di Kota Ambon tahun 2008/2009 adalah 10 proyek senilai Rp.434.636.590.000,- yang akan menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 1.060 orang dan tenaga kerja asing 26 orang.

Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 2008/2009 adalah 10 proyek juga dengan nilai investasi meningkat sebesar 22,95% mencapai Rp.534.378.890.000,- yang menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 604 orang. Bidang usaha yang menyerap investasi besar adalah usaha jasa lainnya sebesar Rp.443.379.120.000,- (82,97%). Sedangkan dari sisi penyerapan tenaga kerja, usaha perikanan menyerap tenaga kerja terbanyak yaitu 305 tenaga kerja (50,50%), diikuti usaha pengangkutan menyerap 110 tenaga kerja (18,21%), sedangkan sektor-sektor lainnya penyerapan tenaga kerja adalah dibawah 100 orang. Jika dibandingkan tahun sebelumnya (2007), pada tahun 2008/2009 ini, PMDN bidang industri kayu tidak beroperasi lagi di Kota Ambon, dan terdapat 1 proyek PMDN baru di bidang Listrik, Gas dan Air yaitu PT Karya Putra Powirin.

b. Penanaman Modal Asing (PMA)

Target Penanaman Modal Asing di Kota Ambon tahun 2008/2009 adalah 14 proyek senilai US\$ 433.362.040,- yang akan menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 10.459 orang dan tenaga kerja asing 122 orang. Realisasi Penanaman Modal Asing tahun 2008/2009 adalah 11 proyek dengan nilai investasi adalah US\$ 41.252.330 atau 9,52% dari target, sedangkan penyerapan tenaga kerja Indonesia adalah 1.705 orang atau 16,30% dari target dan tenaga kerja asing adalah 19 orang atau 16% dari target.

Bidang usaha untuk penanaman modal asing ini adalah sektor perikanan, sektor pariwisata dan sektor jasa lainnya. Sektor jasa lainnya memiliki nilai investasi tertinggi dan penyerapan tenaga kerja terbesar. Nilai investasi sektor jasa lainnya adalah US\$ 26.610.330 (65%). Yang menyerap 1.535 tenaga kerja Indonesia (90%). Sementara itu sektor perikanan menyerap US\$ 14.042.000.- (34%) dengan penyerapan tenaga kerja Indonesia 160 orang (9,38%), sedangkan sektor pariwisata menyerap US\$ 600.000.- (1,45%) dengan penyerapan tenaga kerja Indonesia 10 orang (0,6%).

Jika dibandingkan tahun sebelumnya (2007), pada tahun 2008/2009 ini, proyek PMA di Kota Ambon meningkat menjadi 11 proyek dari sebelumnya 9 proyek di tahun 2007.

##### **5) Tabungan dan Kredit.**

Jumlah penabung dan nilai nominal tabungan di Kota Ambon dalam 2 tahun belakangan ini terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Bank Indonesia Cabang Ambon tahun 2010, jumlah penabung di Kota Ambon tahun 2009 adalah 387.859 penabung, mengalami peningkatan sebesar 10,75% dari tahun 2008 yang berjumlah 350.226 penabung. Nilai nominal tabungan pada tahun 2009 juga mengalami peningkatan sebesar

11,7% dari tahun 2008 yaitu dari Rp.2.367 Triliun pada tahun 2008 menjadi Rp.2.644 Triliun pada tahun 2009.

Animo masyarakat menabung pada Bank Pemerintah sangat tinggi. Pada tahun 2009, penabung pada Bank Pemerintah sebanyak 350.593 orang (90,39%) dan Bank Swasta sebanyak 37.266 orang (9,61%), dengan nilai nominal tabungan pada Bank Pemerintah adalah Rp.1.979 Triliun (75%) dan pada Bank Swasta adalah Rp.664 Milyard (25%).

Sementara itu penyaluran kredit di Kota Ambon dalam 5 tahun belakangan ini terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, berdasarkan data Bank Indonesia Cabang Ambon telah disalurkan kredit sebesar Rp.3.149 trilyun. Jumlah kredit di tahun 2009 ini mengalami peningkatan sebesar Rp.811.741.000.000.- atau 34,73% dari jumlah kredit tahun 2008 yang sebesar Rp.2.337 trilyun. Kredit yang disalurkan sepanjang tahun 2009 berdasarkan jenis penggunaannya diperuntukan sebagian besar untuk konsumsi yaitu sebesar Rp.2.092.886.000.000,- atau 66,46%. Jenis penggunaan kredit yang lain adalah kredit untuk modal kerja sebesar Rp.833.260.000.000,- atau 24,46%, dan kredit untuk investasi Rp.222.945.000.000. atau 7,08%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan kredit di masyarakat Kota Ambon belum sepenuhnya digunakan untuk menunjang perekonomian melalui modal kerja dan investasi, karena penggunaannya untuk kegiatan konsumtif mengambil porsi yang besar yaitu 66,46%.

Penggunaan kredit yang disalurkan tahun 2009 jika dirinci berdasarkan sektor ekonomi menunjukkan bahwa sektor lain-lain menyerap kredit mencapai 66,92% dengan penggunaan utama adalah kegiatan konsumtif. Penyerapan kredit di sektor Perdagangan adalah 22,08% dan sektor Konstruksi adalah 5,76% dengan penggunaan utama adalah untuk modal kerja. Sementara

itu penyerapan kredit sektor-sektor lain yaitu sektor Pertanian, sektor Industri, sektor Listrik, Gas dan Air, sektor Pengangkutan dan sektor Jasa-Jasa, masih dibawah 5% dengan penggunaan utama adalah untuk investasi. Agar lebih jelas perkembangan kredit di Kota Ambon dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 1.15. Perkembangan Posisi Kredit Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2005 – 2009**

NO	SEKTOR	TAHUN				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian	3.188	10.984	16.411	26.860	45.808
2	Industri	2.439	1.288	1.987	9.543	7.442
3	Listrik, Gas & Air	-	-	-	187	158
4	Konstruksi	37.708	75.491	125.546	185.119	181.383
5	Perdagangan	161.945	199.427	300.462	482.705	695.465
6	Pengangkutan	9.938	11.402	13.225	12.663	23.265
7	Jasa-Jasa	11.675	18.467	19.062	33.986	88.272
8	Lain-Lain	622.579	857.682	943.966	1.586.287	2.107.298
	<b>Jumlah</b>	<b>849.472</b>	<b>1.174.741</b>	<b>1.420.659</b>	<b>2.337.350</b>	<b>3.149.091</b>

## **1. STRUKTUR ORGANISASI**

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 dan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, maka sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan, Pemerintah Kota Ambon telah membentuk kelembagaan dan telah di perda-kan masing-masing Perda No. 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat DPRD Kota Ambon, Perda No. 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon, Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, Perda No. 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon dan Perda No. 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kelurahan Kota Ambon, terdiri dari 15 (lima belas) Dinas, 4 (empat) Badan, 1 (satu) Inspektorat, 6 (enam) Kantor dan 2 (dua)



Sekretariat yakni Sekretariat Kota dan Sekretariat DPRD, 5 (lima) Kecamatan dan 20 (dua puluh) Kelurahan.

Berdasarkan lembaga yang telah di bentuk, maka jumlah jabatan struktural sebanyak 651 jabatan yang terdiri dari eselon II.A= 1 orang, eselon II.24 = 25 orang, eselon III.A = 42 orang, eselon III B = 66 orang, eselon IV.A = 348 orang dan eselon IV.B sebanyak 170 orang.

### **Sekretariat Kota**

Sekretariat Kota merupakan unsur staf Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Tugas pokok Sekretaris Kota adalah membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, fungsi dari Sekretaris Kota adalah :

- a. Koordinasi staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat kota di lingkungan Kota Ambon dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan ;
- b. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan ;
- c. Pembinaan pelaksanaan pembangunan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta membantu perkembangan penyelenggaraan pembangunan perekonomian
- d. Pembinaan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, memantau perkembangan penyelenggaraan kemasyarakatan;
- e. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Kota .

Adapun Susunan Organisasi Sekretariat Kota adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Kota
2. Asisten Tata Pemerintahan.
  1. Bagian Tata Pemerintahan
  2. Bagian Hukum
  3. Bagian Humas dan Protokoler.
3. Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.
  1. Bagian Kerjasama dan Promosi Pengembangan Ekonomi
  2. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
4. Asisten Administrasi
  1. Bagian Organisasi dan Manajemen.
  2. Bagian Umum dan Perlengkapan
  3. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi

#### **Sekretariat DPRD**

Sekretariat DPRD adalah unsur staf yang membantu pimpinan DPRD dalam menyalenggarakan tugas dan kewajibannya. Untuk menjalankan tugasnya, Sekretariat Dewan mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerja sama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretaris DPRD
- b. Perencanaan dalam arti menyiapkan rencana, mengelola, menelaah, mengkoordinasikan perumusan kebijakan Pimpinan DPRD ;
- c. Pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tata usaha, mengolah dan membina kepegawaian, mengolah keuangan perbekalan DPRD ;
- d. Menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD ;
- e. Memelihara dan membina ketertiban serta keamanan.

Adapun struktur organisasi Sekretariat Dewan adalah sebagai berikut :

1. Bagian Umum, Humas dan Protokoler
2. Bagian Risalah dan Persidangan.
3. Bagian Keuangan.

## **Dinas-Dinas Kota**

Dinas Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Walikota melalui Sekretariat Kota. Dinas Kota melaksanakan tugas dan fungsi operasional untuk bidang-bidang tertentu.

Jumlah Dinas yang ada di Kota Ambon sebanyak 15 Dinas dengan rincian sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Sosial
4. Dinas Tenaga Kerja
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6. Dinas Perhubungan
7. Dinas Pekerjaan Umum
8. Dinas Tata Kota
9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
11. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
12. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Ekonomi Daerah
13. Dinas Pertanian dan Kehutanan
14. Dinas Kelautan dan Perikanan
15. Dinas Kebersihan dan Pertanaman

## **Lembaga Teknis Kota**

Lembaga Teknis Kota merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

Lembaga Teknis di Kota Ambon berjumlah 11 buah dengan rincian sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

3. Badan Kepegawaian
4. Badan Pengelola Keuangan
5. Inspektorat
6. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan
7. Kantor Perpustakaan dan Kearsipan
8. Kantor Pelayanan Publik
9. Kantor Satuan Pemadam Kebakaran
10. Kantor Pengolahan Data Elektronik
11. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

### **Kecamatan**

Pemerintah Kecamatan merupakan Perangkat Kota yang dipimpin seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

Organisasi Kecamatan terdiri atas Camat, Sekertaris Camat dan Seksi-Seksi

Jumlah Kecamatan yang ada di Kota Ambon sampai dengan tahun 2009 ada 5 Kecamatan, yaitu :

**Tabel 1.16**  
**Jumlah Kecamatan di Kota Ambon**  
**Tahun 2007**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>
1	Sirimau
2	Nusaniwe
3	Teluk Ambon Baguala
4.	Teluk Ambon
5	Leitimur Selatan

**Tabel 1.17**  
**Komposisi Keanggotaan DPRD Kota Ambon**  
**Tahun 2007**

NO	FRAKSI	PEMILU TAHUN 2004	
		JUMLAH ANGGOTA	PRESENTASE
1	PDI	8	27
2	GOLKAR	6	20
3	PELANGI	6	20
4	PKS	4	13
5	PDS	3	10
6	Demokrat	3	10
	JUMLAH	30	100,00

*Sumber : Sekretariat DPRD Kota Ambon*

**Tabel 1.18**  
**Nama dan Jabatan Organisasi**  
**Pemerintahan Kota Ambon**

No	Organisasi	Jumlah	Keterangan
1.	Walikota	1	Kepala Daerah
2.	Wakil Walikota	1	Wakil Kepala Daerah
3.	Sekretarat Kota	1	Terdiri dari: Sekretaris Kota, Asisten Kota dan Bagian-Bagian Kota (Kesra, Hukum, Tata Pemerintahan, Kerjasama dan Promosi Pengembangan Ekonomi, Organisasi dan Manajemen, Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi, Umum dan Perlengkapan, Humas dan protokoler)
4.		1	
5	Sekretariat DPRD	4	Terdiri dari: Sekretaris DPRD, Bagian dan Sub Bagian.
6	Badan	1	Bappekot, BPMPKB, Badan Kepegawaian,
7		14	Badan Pengelolaan Keuangan Kota.
	Inspektoat Dinas		Terdiri dari Inspektorat Kota Hutanak, Perikanan dan Kelautan, Perindag, Koperasi dan UKM, Tenaga Kerja, Kesehatan, Dikor, Sosial, Takedal,
8.		6	Perhubungan, Dispenda; Capil dan pendaftaran penduduk, PU, Pariwisata dan Kebudayaan .
	Kantor		Kantor Satuan Pol. P.P. Kantor Satuan
9		5	Pemadam Kebakaran, Kantor Pengolahan Data Elektronik, Kantor Pelayanan Publik, Kantor Perpustakaan dan Kearsipan, Kantor
	Kecamatan		

			Pengendalian Dampak Lingkungan Nusaniwe, Sirimau, Teluk Ambon Baguala, Teluk Ambon, Leitimur Selatan
--	--	--	--

## **POSISI STRATEJIK KOTA AMBON**

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sepanjang rentang periode lima tahun ke depan, akan diterapkan strategi sebagaimana diuraikan berikut ini : Melakukan konsolidasi organisasi internal untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen jajaran aparatur terhadap tugas dan fungsi pelayanan umum disertai dengan meningkatkan kadar efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya manusia, keuangan dan peralatan.

Mencermati kebijakan pemerintah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dalam kerangka pelaksanaan otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab untuk dijabarkan sebagai kebijakan, strategi Pemerintah Kota Ambon agar dapat mewujudkan peran Kota Ambon sebagai pusat aktivitas ekonomi dan transit bisnis di Provinsi Maluku.

## **2. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP 2010**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Pemerintah Kota Ambon adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintah Kabupaten/Kota untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan stratejik dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus

sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategik yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik pemerintah Kota Ambon. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pemerintah Kota Ambon yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasi kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus.

**Pertama**, Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Kota Ambon untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Gubernur, DPRD dan Masyarakat).

**Kedua**, Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kota Ambon sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap Instansi Pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Pemerintah Kota Ambon Tahun 2009 mencakup hal-hal berikut ini :

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2010 sebagai sarana pertanggung jawaban pemerintah Kota Ambon atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2010. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik telah dicapai selama tahun 2010.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2010 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Kota Ambon bagi upaya perbaikan kinerja di masa datang.

Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah Kota Ambon dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Pemerintah Kota Ambon dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

### **3. SISTEMATIKA LAKIP 2010**

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian Kinerja Pemerintah Kota Ambon selama tahun 2010. Capaian Kinerja (*performance results*) 2010 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2010 sebagai tolok keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian Kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistemetika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon tahun 2010 dapat diilustrasikan dalam bagian berikut ini. Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut :

**Bab I – Gambaran Umum**, menjelaskan secara ringkas profil Pemerintah Kota Ambon dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP 2010 ini.

**Bab II – Rencana Stratejik**, menjelaskan muatan Rencana Stratejik Pemerintah Kota Ambon untuk periode 2006-2011 dan rencana kinerja untuk tahun 2010

**Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pemerintah Kota Ambon dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran stratejik untuk tahun 2010.

**Bab IV – Penutup**, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon tahun 2010 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



# BAB II

## PERENCANAAN STRATEGI

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Sebagai langkah awal perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dapat dibuat oleh pimpinan puncak untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan perwujudan perencanaan strategis dalam perkembangannya sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Daerah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada hakekatnya merupakan suatu perencanaan strategis karena substansinya tidak jauh berbeda dengan Rencana Strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 118 Tahun 2000 yang wajib dibuat oleh setiap Kepala Daerah terpilih dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

### **1. RENCANA STRATEGI**

Sejalan dengan perubahan kebijakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional maupun daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagai penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah kedalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program prioritas.

Mendasari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut Walikota Ambon dalam melaksanakan tugas pada masa jabatan 2006-2011, mendasarinya pada Rencana Pembangunan Jangka menengah Pembangunan Kota Ambon 2006-2011 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat cita-cita, tujuan dan harapan rakyat di Kota Ambon, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini memberikan arah sekaligus acuan bagi Pemerintah Kota Ambon untuk menentukan strategis dan merumuskan program pembangunan 5 (lima) tahun dalam tatanan koordinasi, sinkronisasi, sinergi dan komprehensif, bertahap dan berkelanjutan.

Sejalan dengan itu maka dengan mempresentasikan kondisi dan permasalahan serta hasil-hasil yang dicapai hingga tahun 2006, maka arahan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik yang akan diimplementasikan melalui RPJM diatur secara bertahap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tahap Pertama (2006-2008) dengan melakukan konsolidasi berbagai institusi yang berkompeteten guna memelihara dan meningkatkan stabilitas sosial keamanan secara berkelanjutan terutama melalui optimalisasi modal sosial yang ada dalam masyarakat.

Pencapaian kondisi ini dimaksudkan untuk menjamin seluruh aktifitas pembangunan berjalan aman dan lancar dengan dukungan masyarakat. Disamping itu pada tahap pertama untuk mendukung dinamika pembangunan dalam rangka mewujudkan Kota Ambon sebagai pusat aktifitas ekonomi dan transit bisnis.

Sedangkan pada tahap kedua diarahkan pada peningkatan kondisi kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia ambon dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, bermoral dan bermartabat secara berkelanjutan dengan tetap melanjutkan pembangunan yang sudah

dilaksanakan pada tahap pertama serta memelihara dan meningkatkan stabilitasi sosial dan keamanan secara berkelanjutan.

## **PERNYATAAN VISI DAN MISI**

Dalam konteks kehidupan berbangsa, beragama memainkan peranan penting dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga pemerintah pada umumnya atau instansi pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Ambon 2006-2026 khususnya skenario pembangunan lima tahun tahap pertama disinkronkan dengan visi Walikota Ambon terpilih masa bakti 2006-2011, ditetapkan visi Pemerintah Kota Ambon 2006-2011 sebagai berikut :

***“Terbinanya Persatuan Manusia Ambon Yang Manis Sebagai Prasyarat Membangun Kota Ambon Dan Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Yang Bermartabat Secara Berkelanjutan”***

Tujuan yang ingin dicapai dari visi ini adalah mewujudkan pembangunan Kota Ambon secara berkelanjutan sejalan dengan makin meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kota Ambon yang bermartabat secara berkelanjutan, untuk mencapai tujuan tersebut pada akhir tahun perencanaan faktor stabilitas sosial dan keamanan yang sudah tercipta selama ini menjadi persyaratan untuk dipelihara dan ditingkatkan melalui upaya mewujudkan pembinaan persatuan manusia ambon yang manis secara berkelanjutan.

Perwujudan kondisi yang ingin dicapai sesuai visi yang ditetapkan tersebut akan tercermin pada berbagai bidang strategis yaitu suatu keadaan secara sosial budaya, secara politik, pemerintahan, hukum dan Ham secara ekonomi dan secara sumberdaya alam dan lingkungan.

Terkait dengan itu dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik untuk 5 (lima) tahun kedepan sejalan dengan RPJM ini, berbagai hal penting yang harus diperhatikan untuk pencapaian pemerintahan yang baik dengan membuka ruang dan akses bagi masyarakat, maka hal-hal yang perlu dan senantiasa diperhatikan sebagai berikut :

**a. Efisiensi dan Efektivitas**

Persoalan mendasar yang dihadapi dalam era otonomi dan globalisasi adalah kelangkaan sumber daya, dana, waktu dan kelangkaan kualitas terbaik sumber daya manusia/aparatur, kemampuan mengoptimalkan berbagai sarana kerja untuk mencapai sasaran kerja dan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu tidaklah berlebihan bahwa efisiensi dan efektivitas menjadi suatu nilai utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

**b. Profesional dan Transparan**

Setiap aparat birokrasi sesungguhnya adalah seorang professional terlepas apakah pelaksana teknis operasional ataupun pejabat yang menduduki jabatan puncak pada suatu unit kerja. Profesionalisme adalah upaya sistimatis, terprogram dan secara kontinyu memutakhirkan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya.

Sejalan dengan profesionalisme, keterbukaan (transparansi) dalam menjalankan profesinya dalam arti kata bahwa dalam interaksinya dengan warga masyarakat, pemenuhan kewajiban dan perolehan hak harus secara jujur, adil, bertanggung jawab dan tetap konsisten dengan pemberantasan KKN serta diterapkan secara konsekwen.

**c. Antisipatif, Responsiv dan Inovatif**

Selain organisasi dan aparat pemerintah harus tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, lebih dari itu diperlukan adanya sikap yang antisipatif, yang mampu memberikan jawaban atau solusi terhadap kemungkinan munculnya berbagai permasalahan. Pemerintah yang responsive dan antisipatif

sesungguhnya belum mampu menjawab berbagai tantangan eksternal maupun masalah internal, namun diperlukan sikap yang kreatif dan inovatif.

**d. Orientasi Pelayanan**

Tugas utama pemerintah dalam era otonomi adalah memfasilitasi, menyusun regulasi berbagai aktifitas masyarakat sehingga tetap berada dalam koridor hukum dan norma yang berlaku. Fungsi utama memberikan pelayanan terbaik (prima) untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya aktifitas masyarakat.

**e. Akuntabilitas**

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini bergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

**f. Demokrasi**

Pelaksanaan akuntabilitas dilakukan secara berjenjang dari pemimpin tingkat bawah ke yang paling atas (Presiden) dan selanjutnya Presiden melaksanakan akuntabilitas kepada MPR sebagai wujud pihak yang melaksanakan mandat sesuai kepercayaan rakyat.

Selanjutnya dengan memaknai visi tersebut, maka dalam rangka mewujudkannya ditetapkan misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan pembinaan Manusia Ambon Yang “Manis” secara berkelanjutan
- 2) Mewujudkan pembangunan Kota Ambon secara berkelanjutan
- 3) Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Ambon yang bermartabat secara berkelanjutan.

**TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI**

Untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi sesuai sistem perencanaan strategis perlu menetapkan tujuan dan sasaran strategis agar memudahkan pemerintah Kota Ambon dalam merumuskan program dan kegiatan.

Sejalan dengan itu Pemerintah Kota Ambon dalam mewujudkan rencana guna mengimplementasikan fungsi-fungsi pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2010 menetapkan tujuan, sasaran dan program sebagai berikut :

**Tujuan 1 :**

**Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan dan Pelayanan Publik Secara Baik**

SASARAN	PROGRAM
1. Terselenggara dan bertanggungjawab pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.	1. Pembinaan Birokrasi 2. Perencanaan Pembangunan Daerah. 3. Perencanaan Pembangunan Ekonomi 4. Perencanaan Sosial Budaya 5. Pengembangan Administrasi Perkantoran 6. Rapat Koordinasi BKPRD Kota Ambon 7. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 8. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9. Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah 10. Pembinaan dan Fasilitas pengelolaan Keuangan daerah 11. Penataan Sistem Administrasi Keuangan 12. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
SASARAN	PROGRAM
2. Tersedianya Prasarana dan Sarana Kantor untuk Kelancaran Tugas dan Pelayanan Publik	13. Pelayanan Administrasi Perkantoran 14. Peningkatan Disiplin Aparatur 15. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 16. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 18. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumentasi/Arsip Daerah
3. Terciptanya Peningkatan dan Kemampuan Etos Kerja Aparatur	19. Seleksi Sekretaris Kota Ambon 20. Pendidikan Anak usia Dini 21. Wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 22. Pengembangan Sekolah Pada jenjang Pendidikan Dasar Yang Berkeunggulan 23. Pengembangan Kompetensi dan daya saing peserta didik

	24. Evaluasi KBM Pendidikan Dasar 25. Evaluasi KBM Pendidikan Menengah 26. Evaluasi Promosi Kompetensi Peserta Didik Pendidikan Menengah 27. Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Pengelola Pendidikan
--	---

**Tujuan 2 :**

**Meningkatkan Kualitas Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukkan Karakteristik Wilayah Dengan Tetap Memelihara Kelestarian Lingkungan dan Fungsi Ekosistem**

SASARAN	PROGRAM
4. Tertata dan terkendalinya kota sesuai fungsi tata ruang.	28. Perencanaan Tata Ruang 29. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 30. Pemanfaatan Ruang 31. Pengembangan Data/Informasi
5. Tertata dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.	32. Rehabilitasi Hutan dan Lahan 33. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan 34. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 35. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam 36. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
6. Tertatanya lingkungan pemukiman penduduk.	37. Pembangunan Jalan dan Jembatan 38. Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong - Gorong 39. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 40. Pengembangan Perumahan 41. Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup

**Tujuan 3 :**

**Meningkatkan Dinamika Ekonomi Yang Produktif untuk Mewujudkan Kota Ambon sebagai Pusat Aktivitas Ekonomi dan Transit Bisnis**

SASARAN	PROGRAM
7. Terasilitasi peningkatan dan pengembangan infrastruktur ekonomi dalam menunjang fungsi Kota Ambon sebagai pusat aktivitas ekonomi dan transit bisnis.	42. Pembangunan Jalan dan Jembatan 43. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 44. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 45. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 46. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 47. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

**Tujuan 4 :**

**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial Budaya Secara Optimal**

SASARAN	PROGRAM
8. Terciptanya pengembangan prasarana dan sarana sosial bagi kelancaran pelayanan publik.	48. Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 49. Pendidikan Anak Usia Dini 50. Perbaikan Prasarana Pendidikan Dasar 51. Pengembangan Sarana Pendidikan Dasar 52. Pengadaan Sarana Pendidikan Menengah 53. Pengelolaan Areal Pemakaman



**Tujuan 5 :**

**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Yang Efektif dan Efisien**

SASARAN	PROGRAM
9. Terciptanya peningkatan informasi bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan public.	54. Penataan Administrasi Kependudukan 55. Optmalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 56. Kerjasama Informasi dengan Mass Media
10. Terciptanya peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat di bidang sosial budaya	57. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 58. Keluarga Berencana 59. Kesehatan Reproduksi Remaja 60. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 61. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa 62. Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 63. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya 64. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 65. Pemberdayaan kelembagaan kesos 66. Peningkatan kesempatan kerja 67. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 68. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 69. Pengembangan wawasan Kebangsaan 70. Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 71. Pendidikan Politik Masyarakat 72. Pengembangan Pemasaran Pariwisata 73. Pengembangan Kemitraan 74. Pengelolaan Keragaman Budaya 75. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 76. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 77. Peningkatan Pelayanan Kesehatan lansia 78. Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 79. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 80. Obat dan Perbekalan Kesehatan 81. Upaya Kesehatan Masyarakat 82. Pengawasan Obat dan Makanan 83. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 84. Perbaikan Gizi Masyarakat 85. Pengembangan Lingkungan Sehat 86. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 87. Standarisasi pelayanan Kesehatan
11. Terciptanya peningkatan	88. Penciptaan Iklim Usaha Kecil

Kapasitas dan Kemandirian Masyarakat di Bidang Ekonomi	<p>Menengah Yang Kondusif</p> <p>89. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</p> <p>90. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi</p> <p>91. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</p> <p>92. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</p> <p>93. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</p> <p>94. Peningkatan Produksi hasil ternak</p> <p>95. Pengembangan kawasan budidaya laut, air pagau dan air tawar</p> <p>96. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</p> <p>97. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</p> <p>98. Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi</p>
--	---

Apabila dilihat dari metodologi balanced scorecard yaitu salah satu teknik atau pendekatan yang digunakan dalam merumuskan tujuan strategi, untuk mendapatkan keseimbangan yang wajar dari masing-masing perspektif utama sesuai dengan gambaran peta strategis dari tujuan strategis Kota Ambon adalah

<b>Perspektif</b>	<b>Tujuan Strategis</b>
<b>Masyarakat / Citizen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya stabilitas keamanan</li> <li>2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat.</li> <li>3. Meningkatnya pusat aktivitas ekonomi dan transit bisnis.</li> <li>4. Mantapnya keseimbangan daya dukung lingkungan hidup.</li> <li>5. Meningkatnya nuansa persaudaraan dan demokrasi.</li> </ol>
<b>Keuangan / Budget</b>	
<b>Proses Bisnis Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Meningkatnya pengembangan ekonomi kerakyatan.</li> <li>7. Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan yang lebih memadai.</li> </ol>
<b>Pembelajaran/ Pertumbuhan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Melakukan Penataan Kelembagaan Pemerintah Kota dan mengembangkan otonomi daerah.</li> <li>9. Meningkatnya stabilitas sosial.</li> </ol>

Pada sektor publik perspektif keuangan dalam balanced scorecard dapat disubstitusi menjadi perspektif budget. Namun demikian keberhasilan organisasi publik tidaklah diukur dengan bagaimana menjaga pengeluaran sesuai dengan anggaran atau bahkan dengan penghematan besar-besaran, melainkan seberapa efektif dan efisien organisasi dalam memenuhi visi dalam rangka memberi pelayanan publik.

## **2. RENCANA KINERJA TAHUN 2010**

Aktivitas atau kegiatan instansi pemerintah setiap tahun merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut.

Dengan demikian kegiatan organisasi merupakan penjabaran kebijaksanaan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberi kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Dalam kaitan itu penyusunan Rencana Kinerja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2009 pada hakekatnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategi Kota Ambon 2006-2011 yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran.

Rencana Kinerja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2010 merupakan penjabaran target kinerja harus dicapai dalam pelaksanaan 1 tahun anggaran. Target kinerja dimaksud menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategis maupun indikator kinerja pada tingkat kegiatan.

Indikator kinerja tersebut merupakan perbandingan bagi proses pengukuran untuk melihat sejauhmana keberhasilan dan kegagalan organisasi Pemerintah Kota Ambon pada akhir tahun anggaran.

Gambaran mengenai sasaran strategis dan target yang ingin dicapai pada setiap indikator kinerja sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET	TARGET ANGG. 2010
1.	Terselenggara dan bertanggungjawab Pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.	➤ Tersedianya Data Penempatan pegawai dalam jabatan struktural maupun fungsional	Paket	1	Rp.17.734.812.582
		➤ Tersusunnya dokumen perencanaan dan pembangunan kota.	Paket	1	
		➤ Tercapainya perhitungan penerimaan daerah.	Paket	1	
		➤ Terselenggaranya pertanggungjawaban kepala daerah.	Paket	1	
		➤ Terlaksananya Kegiatan-Kegiatan Dewan	Paket	1	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET	TARGET ANGGARAN 2010
2.	Tersedianya Prasarana dan Sarana Kantor untuk kelancaran tugas dan pelayanan publik	➤ Terbangun dan terehabnya gedung kantor	Unit	21	Rp.43.134.004.978
		➤ Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	
		➤ Tersedianya sarana angkutan	Paket	1	
		➤ Tersedianya peralatan kantor	Paket	1	
		➤ Tersedianya sarana	Paket	1	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET	TARGET ANGGARAN 2010
3.	Terciptanya peningkatan kemampuan dan etos kerja aparatur	➤ Tersedianya personil untuk jabatan struktural	Orang	94	Rp.3.585.120.240
		➤ Terciptanya peningkatan ketrampilan teknis operasional	Paket	1	
		➤ Terseleksinya PNS Kota	Orang	10.000	
		➤ Terciptanya peningkatan Kinerja Aparatur	Paket	1	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET	TARGET ANGGARAN 2010
4.	Tertata dan terkendalinya kota sesuai fungsi tata ruang	➤ Tertatanya Kota Ambon sesuai fungsi dan peruntukannya.	Paket	1	Rp.2.032.759.525
		➤ Tersedia papan informasi.	Paket	1	
		➤ Tersedianya data/peta garis batas wilayah	Paket	1	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET	TARGET ANGGARAN 2010
5.	Tertata dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.	➤ Terlaksananya pembuatan tanaman hutan rakyat	Ha	88	Rp.2.885.320.637
		➤ Terlaksananya pembuatan kebun bibit desa	Ha	75	
		➤ Terlaksananya penghijauan kota	Ha	75	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET	TARGET ANGGARAN 2010
6.	Tertatanya lingkungan pemukiman penduduk	➤ Tersedianya sarana air bersih.	Paket	1	26.002.964.565
		➤ Tersedianya jalan lingkungan dan bangunan pelengkap.	Paket	1	
		➤ Terbangunnya tembok pantai.	Paket	1	
		➤ Terbangunnya tembok penahan tanah.	Paket	1	
		➤ Tersedianya drainase kota	Paket	1	
		➤ Tersedianya rumah layak huni.	Paket	1	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET	TARGET ANGGARAN 2010
7.	Terfasilitasi peningkatan dan pengembangan infrastruktur ekonomi dalam menunjang fungsi Kota Ambon sebagai pusat aktivitas ekonomi dan transit bisnis.	➤ Terpeliharanya jalan hotmix.	Paket	1	Rp.35.364.515.267
		➤ Tersedianya jalan aspal.	Paket	1	
		➤ Tersedianya jembatan.	Paket	1	
		➤ Tersedianya warning light.	Paket	1	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARG	TARGET ANGGARAN 2010
8.	Terciptanya pengembangan parasarana dan sarana sosial bagi kelancaran pelayanan public.	➤ Terehabnya prasarana kesehatan	Paket	1	Rp.20.298.928.480
		➤ Tersedianya sarana prasarana kesehatan	Paket	1	
		➤ Terehabnya prasarana pendidikan.	Paket	1	
		➤ Terbangunnya puskesmas/pustu	Paket	1	
		➤ Tersedianya sarana prasarana kantor	Paket	1	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET	TARGET ANGGARAN 2010
9.	Terciptanya peningkatan informasi bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan publik	➤ Tersedia data base kependudukan.	Paket	1	Rp.142.759.500
		➤ Tersedia jaringan internet.	Paket	1	
		➤ Terciptanya pengembangan informasi.	Paket	1	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET	TARGET ANGGARAN 2010
10.	Terciptanya peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat di bidang sosial budaya	➤ Terciptanya peningkatan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera	Paket	1	Rp.4.323.109.254
		➤ Tertanggulangi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Paket	1	
		➤ Terpeliharaan ketentuan dan ketertiban masyarakat	Paket	1	
		➤ Terpeliharanya kesehatan masyarakat	Paket	1	
		➤ Terkelolanya keragaman dan	Paket	1	

		kekayaan budaya			
--	--	-----------------	--	--	--

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET	TARGET ANGGARAN 2010
11.	Terciptanya peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat di bidang ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terciptanya persaingan/iklim usaha yang kondusif</li> <li>➤ Terciptanya pengembangan kewirausahaan</li> <li>➤ Terlaksananya promosi bagi pengembangan investasi</li> <li>➤ Terciptanya peningkatan ketahanan pangan</li> <li>➤ Terwujudnya pengembangan industri dan perdagangan</li> </ul>	Paket  Paket  Paket  Paket  Paket	1  1  1  1  1	Rp.4.125.927.495

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Pada hakekatnya Akuntabilitas suatu Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi tersebut untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksana Misi Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Terkait dengan itu Pemerintah Kota Ambon dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 mengacu pada Rencana Strategis 2006-2011 yang diimplementasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana tertuang dalam APBD Kota Ambon Tahun 2010 dan realisasi pelaksanaannya berdasarkan pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja.

Secara umum dapat digambarkan bahwa sasaran yang ditarget pada Rencana Kinerja Tahun 2010 minimal telah memberikan harapan yang berarti.

### **A. PENGUKURAN KINERJA 2010**

Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan, karena kinerja yang diukur akan mendorong pencapaian kinerja tersebut. Untuk melihat sejauhmana tingkat keberhasilan dan kegagalan, maka seluruh aktivitas dari instansi pemerintah harus dapat diukur. Pengukuran program/kegiatan lebih ditekankan pada indikator output, outcome, benefit dan impact bagi peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat. Dalam melakukan pengukuran kinerja Pemerintah Kota



Ambon menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran. Pendekatan melalui metode ini yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai setelah dilakukan perbandingan kemudian dibuat analisis terhadap kesenjangan yang terjadi antara apa yang diharapkan dan hasil yang dicapai serta upaya perbaikan dimasa mendatang.

## **B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA 2010**

Evaluasi kinerja Tahun 2010 dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian realisasi kemajuan dan kendala yang dicapai dalam pencapaian misi dan melakukan analisis dengan melihat keterkaitan kinerja kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Berdasarkan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2010 terutama dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan didasarkan pada kegiatan sesuai rencana kinerja tahunan menunjukkan hasil yang cukup memadai dengan rata-rata realisasi mencapai 100 %. Keberhasilan kinerja kegiatan tersebut memberi andil bagi pencapaian kinerja program karena kinerja program merupakan hasil komulatif dari kinerja berbagai kegiatan yang pada gilirannya memberi peluang pada perwujudan sasaran. Berdasarkan analisis pencapaian sasaran sesuai indikator-indikator sasaran yang umumnya pengukuran dilakukan pada indikator outcome menunjukkan keberhasilan pada level 100 %.

Gambaran evaluasi dan analisis capaian masing-masing sasaran diuraikan sebagai berikut :

## **Terselenggara dan Bertanggungjawab Pelaksanaan**

### **1 Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Publik**

Indikator keberhasilan terselenggara dan bertanggungjawab pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dengan target dan sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SAT.</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
- Tersedianya Data penempatan pegawai dalam jabatan struktural maupun fungsional	Paket	1	1	100
- Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Kota	Paket	1	1	100

- Tercapainya Perhitungan Penerimaan Daerah	Paket	1	1	100
- Terselenggaranya Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Paket	1	1	100
- Terlaksananya kegiatan-kegiatan dewan	Paket	1	1	100

Dalam rangka mewujudkan pencapaian indikator sasaran tersebut, Pemerintah Kota Ambon mengupayakan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan analisa beban kerja 1 Paket
- Penyusunan Tata Naskah Dinas 1 paket
- Penyusunan RKPD 1 Paket
- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1 Paket
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) 1 Paket
- Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawabab (LKPJ/LPPD) 1 Paket
- Penyusunan Ranperda RDTR 1 Paket

- Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS 1 Paket
- Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 1 Paket
- MUSRENBANG TK. Kecamatan se Kota Ambon 1 Paket
- MUSRENBANG Tk. Desa/Kel. Se Kota Ambon 1 Paket
- Rapat kerja dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan 2009 1 Paket
- Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di perkotaan 1 Paket
- Penyiapan dana pendampingan untuk program kerja sama dengan UNICEF 1 paket
- Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 1 paket
- Pelaksanaan sosialisasi RTRW Kota kepada multistakeholder 1 paket
- Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 1 Paket
- Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan pelaksanaan pembangunan daerah 1 paket
- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1 Paket
- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2010 1 paket
- Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2011 1 Paket
- Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD Tahun 2009 1 Paket
- Penyediaan biaya olah raga dan kesenian 1 Paket
- Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Pusat 1 Paket

- Rapat-Rapat Alat kelengkapan Dewan 1 Paket
- Rapat-Rapat Paripurna paket
- Kegiatan reses Dewan 1 Paket
- Sewa kendaraan Tamu Dewan dan barang Sekretariat 1 paket
- Kunjungan Kerja pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 1 Paket
- Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 1 paket
- Sosialisasi peraturan Perundang-Undangan 1 Paket
- Pembahasan LPKJ Tahun 2009 1 paket
- Pengkajian Perda, Peraturan dan Keputusan Walikota 1 Paket
- Kunjungan Kerja Luar Daerah 1 Paket
- Penyaringan Aspirasi masyarakat 1 Paket
- Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan Anggota Dewan 1 Paket
- Perayaan hari-hari besar keagamaan dan hari-hari besar nasional 1 Paket
- Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 Paket
- Penyusunan pelaporan Kegiatan Semesteran 1 Paket
- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 Paket
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Perhitungan 1 Paket
- Penyusunan KUA, PPAS, RKA SKPD, APBD Perubahan, APBD Perhitungan 1 Paket
- Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD 1 Paket
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD 2011 1 Paket
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan

#### APBD 1 Paket

- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 1 paket
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD1 Paket
- Penyusunan Standar Analisa Belanja (SAB) 1 paket
- Penyusunan Neraca Daerah Tahun 2010 1 Paket
- Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun 2010 1 Paket
- Penerapan Dokumen Pelaksana Perubahan Dokumen Anggaran 2010 1 Paket
- Penerapan sistem Informasi Pengelolaan keuangan Daerah 1 Paket
- Penyusunan peraturan Kepala Daerah tentang pengelolaan belanja, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan keuangan 1 Paket
- Penungguan Petugas pada objek Pajak 1 Paket
- Pelaksanaan Pemungutan PBB 1 Paket
- Peningkatan Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Kota di bidang Penerimaan Daerah 1 paket
- Penyusunan Buku Himpunan Peraturan Keuangan 1 paket
- Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) 1 Paket
- Pengandaan Aplikasi Gaji Otonom 1 Paket
- Penyusunan Laporan Dana Perimbangan 1 Paket
- Penyusunan Laporan Semesteran Pemerintah Kota Ambon 1 Paket
- Penyusunan Laporan Laporan Kas Daerah 1 Paket
- Evaluasi, Monitoring dan Pertanggung Jawaban SPJ SKPD 1 Paket

- Peningkatan Pelaksanaan Koordinasi Teknis Unit Pengelola PAD 1 paket
- Revaluasi Aset Barang Daerah 1 paket
- Penyediaan Sarana prasarana sistem informasi pengelolaan keuangan Daerah (SIPKD) 1 Paket
- Pelaksanaan sistem Akuntansi pengelolaan Keuangan Daerah 1 Paket
- Pemutahiran Data Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) 1 Paket
- Aplikasi Gaji Daerah Kota Ambon 1 paket
- Monitoring dan Evaluasi Gaji Guru 1 Paket
- Penataan Arsip Keuangan 1 Paket
- Melaksanakan kegiatan pramemutahiran data tingkat Kota Ambon 1 paket
- Melaksanakan kegiatan Gelar Pengawasan dan Temu Karya Pengawasan 1 Paket
- Pelaksanaan laporan kekayaan pejabat negara
- Pendampingan ADB 1 paket

**2 Tersedianya Prasarana dan Sarana Kantor Untuk Kelancaran Tugas dan Pelayanan Publik**

Indikator keberhasilan tersedianya prasarana dan sarana kantor untuk kelancaran tugas dan pelayanan publik dengan target dan sasarnya dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET	REALISASI	%
- Terbangun dan terehabnya gedung kantor	Unit	21	21	100
- Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	paket	1	1	100
- Tersedianya sarana angkutan	Paket	1	1	100
- Tersedianya peralatan kantor	Paket	1	1	100
- Tersedianya sarana	Paket	1	1	100

Pemerintah Kota Ambon dalam mewujudkan tercapainya indikator sasaran tersebut diupayakan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan jasa Surat Menyurat 1 Paket
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 paket
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Paket
- Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional 1 paket
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 paket
- Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 1 paket
- Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan 1 Paket
- Penyediaan Jasa Administrasi keuangan 1 paket
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor 1 paket
- Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Paket
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Paket
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 1 Paket
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Paket
- Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Paket
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 1 paket
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 1 paket
- Penyediaan pembuatan penyelesaian perkara 1 paket
- Penyediaan jasa publikasi dan dokumentasi 1 paket
- Pengadaan pakaian Dinas serta perlengkapannya 1 Paket
- Pengadaan pakaian olah raga 1 paket
- Pengadaan Pakaian Dinas Staf 1 Paket
- Pengadaan pakaian kerja lapangan 1 Paket

- Penyediaan biaya olah raga dan kesenian 1 paket
- Pengadaan kamera video 1 paket
- Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor 1 paket
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 1 Paket
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/berkala Alat Berat 1 paket
- Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas 1 paket
- Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 paket
- Pemeliharaan Rutin/berkala Meubeler 1 Paket
- Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan 1 paket
- Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Rumah Jabatan/Dinas 1 paket
- Pengadaan Mobil Jabatan 1 paket
- Pengadaan peralatan Rumah Jabatan/Dinas 1 paket
- Pengadaan Meubeler 1 paket
- Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional 1 Paket
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Paket
- Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Paket
- Sewa Rumah Jabatan/Dinas 1 paket
- Rehabilitasi sedang/berat Mobil Jabatan 1 paket
- Persertifikatan tanah 1 paket
- Pengadaan sarana pengelolaan dan penyimpanan arsip 1 Paket

**3 Terciptanya Peningkatan Kemampuan dan Etos Kerja Aparatur**

Indikator keberhasilan terciptanya peningkatan kemampuan dan etos kerja aparatur dengan target dan sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

--	--	--	--	--



<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SAT.</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
- Tersedianya personil untuk jabatan struktural	Orang	94	94	100
- Terciptanya peningkatan keterampilan teknis operasional	Paket	1	1	100
- Terseleksinya PNS Kota	Orang	10.000	10.000	100
- Terciptanya peningkatan Kinerja Aparatur	Paket	1	1	100

Pemerintah Kota Ambon dalam mewujudkan pencapaian indikator sasaran tersebut diupayakan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Terisinya Jabatan Sekretaris Kota Ambon 1 Paket
- Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Kota Ambon 1 Paket
- Bimbingan Teknis Staf Sekretariat DPRD 1 Paket
- Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan (PIM Tkt II) 1 paket
- Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi (Satya Lencana) 1 paket
- Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah (Golongan III) 1 paket
- Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah (Golongan II) 1 paket
- Penyelenggaraan Ujian Dinas dan penyesuaian Ijazah 1 paket
- Penyusunan Buku Himpunan Peraturan Daerah tentang keuangan 1 paket
- Rapat koordinasi teknis program 1 Paket
- Penyelenggaraan diklat teknis fungsional dan kepemimpinan Tk.II 1 paket
- Pengambilan Sumpah /janji pegawai 1 Paket
- Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi (Satya Lencana) 1 paket
- Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 1 Paket
- Pengadaan Buku Laporan Evaluasi belajar TK 1 Paket

- Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa 1 paket
- Pengadaan Mebeleur penganti SD dan SMP 1 Paket
- Pengadaan Buku Laporan Pendidikan SD dan SMP 1 Paket
- Pengadaan Mebeleur Penganti SMA dan SMK 1 paket
- Olimpiade MIPA dan LPIR/LKIR SMA 1 Paket
- Olimpiade Sians Tingkat Kota Ambon untuk jenjang SD dan SMP 1 Paket
- Evaluasi hasil belajar (SD/MI dan SMP/MTs)
- Penyelenggaraan evaluasi hasil belajar SMA/MA dan SMK
- Pengadaan buku laporan pendidikan SMA/SMK
- Uji kompetensi siswa SMK
- Penyusunan Ranperda penyelenggaraan pendidikan 1 paket
- Penyusunan implementasi program pembelajaran dengan mengadopsi model JICA di setiap sekolah

#### **4 Tertata dan Terkendalnya Kota Sesuai Fungsi Tata Ruang**

Indikator keberhasilan tertata dan terkendalnya kota sesuai fungsi tata ruang dengan target dan sasaraannya dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET	REALISASI	%
- Tertatanya Kota Ambon Sesuai Fungsi dan Peruntukannya	Paket	1	1	100
- Tersedia Papan Informasi	Paket	1	1	100
- Tersedianya Data/Peta Garis Batas Wilayah	Paket	1	1	100

Untuk mewujudkan pencapaian indikator sasaran Pemerintah Kota Ambon mengupayakan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan dan konsultasi Ranperda RDTR
- Rapat koordinasi BKPRD Kota Ambon

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penataan Ruang
- Survey dan updating data spesial Kota Ambon 1 paket
- Fasilitasi peningkatan peran serta dalam pengendalian pemanfaatan ruang (pembuatan papan IMB) 1 paket
- Pengawasan pemanfaatan ruang pemasangan papan informasi pemasyarakatan pemanfaatan ruang 1 Paket
- Perencanaan dan pengawasan pengembangan infrastruktur 1 Paket
- Pembangunan / Peningkatan infrastruktur 1 paket
- Penyusunan Desain dan Pembangunan Reklame Center
- Updating Profil Kota Ambon 1 Paket
- Penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah 1 Paket
- Operasional pelayanan kehumasan Pemerintah Kota Ambon 1 Paket

## **5 Tertata dan Terkendalinya Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Pelestarian Lingkungan**

Indikator keberhasilan tertata dan terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan dengan target dan sasaran yang dapat digambarkan sebagai berikut :

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SAT.</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
- Terlaksananya Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat	Ha	88	88	100
- Terlaksananya Pembuatan Kebun Bibit Desa	Ha	75	75	100
- Terlaksananya Penghijauan Kota	Ha	75	75	100

Pemerintah Kota Ambon dalam mewujudkan pencapaian indikator sasaran tersebut diupayakan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan sebagai berikut :

- Pembuatan Tanaman Reboisasi

- Pembuatan tanaman Hutan Rakyat
- Pembuatan Kebun Bibit trembesi
- Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat Tahun II
- Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Tahun I
- Operasional Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1 paket
- Penanaman kiri kanan sungai
- Pengembangan sarana prasarana penyuluhan kehutanan
- Pengembangan sarana prasarana pengamanan hutan
- Pembuatan sumur resapan
- Koordinasi penilaian Kota Sehat Adipura 1 Paket
- Penertiban kegiatan pertambangan tanpa ijin 1 Paket
- Pengadaan alat-alat laboratorium lingkungan 1 Paket
- Peningkatan konserfasi Daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
- Pembuatan sumur resapan
- Perencanaan dan pengawasan pembuatan sumur resapan 1 paket
- Pemeliharaan ruang terbuka hijau

## 6      **Tertatanya Lingkungan Pemukiman Penduduk**

Indikator keberhasilan Tartatanya Lingkungan Pemukiman Penduduk dengan target dan sasaran yang dapat digambarkan sebagai berikut :

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SAT.</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
- Tersedianya sarana air bersih	Paket	1	1	100
- Tersedianya jalan lingkungan dan bangunan pelengkap	Paket	1	1	100
- Terbangunnya tembok pantai	Paket	1	1	100
- Terbangunnya tembok penahan tanah	Paket	1	1	100
- Tersedianya drainase kota	Paket	1	1	100
- Tersedianya rumah layak huni	Paket	1	1	100

Pemerintah Kota Ambon dalam mewujudkan pencapaian indikator sasaran diupayakan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Perencanaan dan pengawasan teknik pembangunan jalan Kota Ambon
- Perencanaan dan pengawasan teknik pembangunan jembatan Kota Ambon
- Pembangunan jembatan Dusun Air Ali
- Perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan lanjutan TA 2009
- Pembangunan jembatan Kelurahan Rijali lanjutan TA.2009
- Pembangunan Jalan Lingkungan dan Bangunan Pelengkap Desa Batu Merah
- Pembangunan Jalan Lingkungan dan Bangunan Pelengkap Desa Nania
- Pembangunan Jalan Lingkungan dan Bangunan Pelengkap Desa Waiheru
- Pembangunan Jalan Lingkungan dan Bangunan Pelengkap Dusun Wailete
- Pembangunan Jalan Lingkungan dan Bangunan Pelengkap Desa Passo Pohon Ketapang
- Pembangunan Jalan Lingkungan dan Bangunan Pelengkap Desa Passo Waimahu
- Pembangunan Jalan Lingkungan dan Bangunan Pelengkap Dusun Taeno
- Pembangunan Jalan Lingkungan dan Bangunan Pelengkap Desa Passo TPU

- Pembangunan Jalan Lingkungan dan Bangunan Pelengkap Desa Wailela Atas
- Kegiatan Rehab jalan lingkungan dan Bangunan pelengkap lanjutan TA 2009
- Perencanaan dan pengawasan saluran drainase/gorong-gorong
- Kegiatan perencanaan dan pengawasan pembangunan saluran Drainase /Gorong-gorong lanjutan TA 2009
- Pembangunan saluran drainase lanjutan 2009
- Pemeliharaan saluran drainase
- Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum
- Perencanaan dan pembangunan Air minum lanjutan TA 2009
- Pembangunan sarana dan prasarana air bersih
- Pembangunan prasarana air bersih Kota Ambon (tersebar) lanjutan TA 2009
- Pembangunan sarana dan prasarana air limbah Desa Soya Kayu Tiga
- Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan
- Penyediaan prasarana dan sarana persampahan
- Pemeliharaan IPST
- Sosialisasi Revisi Perda nomor 19, 20 dan 21
- Pembangunan Rumah Sehat Sederhana
- Pemberian stimulan perumahan swadaya (BSP2S)
- Penyusunan Perda Penyerahan Sarana prasarana dan utilitas perumahan dan pemukiman
- Revisi Perda Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi IMB
- Koordinasi penilaian Kota Sehat Adipura
- Penertiban kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI)

**7 Terfasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi dalam Menunjang Fungsi Kota Ambon Sebagai Pusat Aktifitas Ekonomi dan Transit Bisnis**

Indikator keberhasilan terfasilitasi peningkatan dan pengembangan infrastruktur ekonomi dalam menunjang fungsi kota Ambon sebagai pusat aktifitas ekonomi dan transit bisnis dengan target dan sasaran yang dapat digambarkan sebagai berikut:

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SAT.</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
- Terpeliharanya jalan Hotmix	Paket	1	1	100
- Tersedianya Jalan Aspal	Paket	1	1	100
- Tersedianya Jembatan	Paket	1	1	100
- Tersedianya Warning Light	Paket	1	1	100

Pemerintah Kota Ambon dalam mewujudkan pencapaian indikator sasaran diupayakan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan jalan 1 paket
- Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jembatan 1 paket
- Pembangunan Jembatan Dusun Air Ali 1 paket
- Pembangunan Jembatan Kel. Rijali (lanjutan TA. 2009) 1 paket
- Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 1 paket
- Pembangunan Talud Penahan Tanah Jl. Hatalai – sampai Ema (lanjutan TA.2009) 1 paket
- Pembangunan Talud Pengaman pantai 1 paket
- Pembangunan Talud pengaman sungai 1 paket
- Perencanaan dan pengawas rehabilitasi/pemeliharaan jalan
- Peningkatan jalan Aspal Benteng Atas
- Peningkatan jalan aspal Desa Silale
- Pemeliharaan berkala jalan Aspal Benteng - Farmasi
- Pemeliharaan berkala jalan Aspal desa Hative Kecil

- Pemeliharaan berkala jalan aspal Jl.jan Paays dan Setia budi
- Pemeliharaan berkala jalan aspal Desa Nania
- Pemeliharaan berkala jalan aspal Lembah Argo
- Pemeliharaan berkala jalan aspal Desa Hatalai
- Pemeliharaan berkala jalan aspal Desa Hatalai sampai Desa Ema
- Pemeliharaan berkala jalan aspal Desa Hukurila
- Pemeliharaan berkala jalan aspal Desa Hutumuri - Berebere
- Pemeliharaan berkala jalan aspal desa Tawiri
- Pemeliharaan berkala jalan aspal desa Hutumuri / Lawamena
- Pemeliharaan Berkala jalan Aspal Benteng Karang
- Pemeliharaan Berkala jalan Aspal Desa Passo – Bt Gong
- Pemeliharaan Berkala jalan Aspal Dusun Siwang
- Pemeliharaan Berkala jalan Aspal Desa Soya
- Pemeliharaan berkala jalan Aspal Kel.Mangga Dua - Mahia
- Pemeliharaan Berkala jalan Aspal Karpan - Ahuru
- Pemeliharaan Berkala jalan Aspal Desa Tawiri – Dusun Weti
- Pemeliharaan Berkala jalan Aspal Desa Hative Kecil Perumahan
- Rehabilitasi trotoar jalan masuk terminal
- Rehabilitasi trotoar jalan Sam Ratulangi
- Rehabilitasi trotoar jalan Anthoni Rhebok
- Rehabilitasi trotoar jalan Kartini
- Rehabilitasi trotoar jalan Ina Tuni
- Rehabilitasi jalan dan Bangunan pelengkap
- Peningkatan dan pemasangan pembangunan SUTM
- Pembuatan Data Jaringan Listrik dan Lampu Jalan umum
- Pemeliharaan materisasi lampu jalan
- Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum
- Pengawasan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh



- Pembangunan kawasan Merdeka Square dan kawasan Tugu Pattimura 1 Paket
- Pembangunan gedung terminal

## **8 Terciptanya Pengembangan Prasarana dan Sarana Sosial Bagi Kelancaran Pelayanan Publik**

Indikator keberhasilan terciptanya pengembangan prasarana dan sarana sosial bagi kelancaran pelayanan publik dengan target dan sasaran yang dapat digambarkan sebagai berikut :

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SAT.</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
- Terehabnya prasarana kesehatan	Paket	1	1	100
- Tersedianya sarana prasarana kesehatan	Paket	1	1	100
- Terehabnya prasarana pendidikan	Paket	1	1	100
- Terbangunnya Puskesmas/ Pustu	paket	1	1	100
- Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Paket	1	1	100

Pemerintah Kota Ambon dalam mewujudkan tercapainya indikator sasaran tersebut dilakukan melalui upaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1 Paket
- Pembangunan Puskesmas pembantu Telaga Raja
- Perawatan Gedung (anti rayap)
- Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu 1 Paket
- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Penunjang 1 paket
- Pembangunan Puskesmas 1 paket
- Rehabilitasi sedang/berat sarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya
- Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu
- Perencanaan dan pengawasan teknis sarana kesehatan
- Pengadaan buku laporan evaluasi belajar (TK)

- Rehabilitasi Rusak Sedang/Berat Ruang Kelas SMP 1 paket
- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Mobilitas Sekolah 1 paket
- Pengadaan Meubeler Sekolah
- Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
- Pengadaan Lab Bahasa untuk sekolah berstandar Internasional
- Pengadaan Buku laporan pendidikan (SMA dan SMK)
- Pengadaan meubeler pengganti SMA dan SMK
- Pemeliharaan sapra pemakaman

**9 Terciptanya Peningkatan Informasi Bagi Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Pelayanan Publik**

Indikator keberhasilan terciptanya peningkatan informasi bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan publik dengan target dan sasaran yang dapat digambarkan sebagai berikut :

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SAT.</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
- Tersedia data base kependudukan	paket	1	1	100
- Tersedia jaringan internet	paket	1	1	100
- Tercapainya pengembangan informasi	paket	1	1	100

Pemerintah Kota Ambon dalam mewujudkan indikator sasaran tersebut diupayakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Penyebarluasan informasi pembangunan Daerah 1 paket
- Penyebarluasan informasi pembangunan Daerah 1 paket

**10 Terciptanya Peningkatan Kapasitas dan Kemandirian Masyarakat di Bidang Sosial Budaya**

Indikator keberhasilan terciptanya peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat di bidang sosial budaya dengan target dan sasaran yang dapat digambarkan sebagai berikut :

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SAT.</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
- Terciptanya Peningkatan Keluarga Kecil, Bahagia dan Sejahtera	Paket	1	1	100
- Tertanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Paket	1	1	100
- Terpeliharanya Ketentuan dan Ketertiban Masyarakat	Paket	1	1	100
- Terpeliharanya Kesehatan masyarakat	Paket	1	1	100
- Terkelolanya Keragaman dan Kekayaan Budaya	Paket	1	1	100

Pemerintah Kota Ambon dalam mewujudkan indikator sasaran tersebut diupayakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi program penanganan kemiskinan perkotaan (P2KP)
- Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi keluarga Miskin
- Rapat Koordinasi Teknis Program KB
- Penetapan dan Pendataan Keluarga dan Keluarga Miskin
- Pertemuan teknis medis kader melalui orientasi kader PPKBD
- Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- Rapat koordinasi teknis pemberdayaan
- Lomba Desa/Kelurahan Kota Ambon 1 paket
- Rapat Koordinasi dan keterpaduan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Pembinaan dan penilaian Program P2WE-KSS
- Peningkatan kemampuan petugas dan pendampingan sosial, pemberdayaan fakir miskin PMKS lainnya
- Operasional penyaluran bantuan santunan hidup bagi lansia terlantar
- Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 1 Paket
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan program pemberdayaan fakir miskin

- Operasional penyaluran bantuan santunan hidup bagi lansia terlantar
- Operasional penyaluran bantuan santunan hidup bagi penyandang cacat berat
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan
- Bimbingan dan pelatihan ketrampilan bagi anak terlantar
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
- Penyusunan data base tenaga kerja
- Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- Sosialisasi UMP dan THR di perusahaan
- Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
- Penertiban siswa bolos sekolah
- Pelaksanaan pendataan organisasi kemasyarakatan
- Sosialisasi Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 8 dan No 9 Tahun 2006
- Seleksi peserta Paskibraka
- Pendataan partai politik melalui monitoring dan evaluasi
- Penyusunan Data Base Organisasi Profesi dan Organisasi Masyarakat
- Materi promosi pariwisata
- Darwin Ambon Yacht Race 2010
- Seleksi Indonesia Idol 2010
- Legeslasi rancangan peraturan perundang-undangan 1 paket
- Pagelaran seni budaya bagi Guru-guru dan murid

- Pagelaran musik hawaian 1 Paket
- Festival paduan suara antar SMA / SMK
- Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 1 Paket
- Pengadaan kartu deteksi dini tumbuh kembang anak
- Pelacakan deteksi dini tumbuh kembang anak
- Operasional Posyandu dan Poskesdes
- Pengadaan KMS Lansia
- Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restoran dan rumah makan
- Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
- Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan keliling
- Pertemuan audit matemal dan perinatal
- Pengadaan buku KIA
- Pengadaan kartu periksa ibu hamil
- Pertemuan PWS dan evaluasi program KIA
- Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
- Peningkatan pemerataan obat dan pembekalan kesehatan
- Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
- Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial
- Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
- Kapitasi Askes
- Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
- Pengembangan Desa siaga
- Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
- Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

- Lomba Posyandu tingkat Kota Ambon
- Pemberian tambahan makanan dan vitamin
- Peningkatan Survei Gizi
- Bahan kaporisasi dan pelaksanaan kaporisasi
- Inspeksi sanitasi SAB dan pengambilan sampel air serta pemeriksaan
- Pemeriksaan Laboratorium (Kimia Bakteriologi)
- Peningkatan Surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah
- Pengadaan alat-alat fogging dan bahan fogging
- Pengadaan vaksin penyakit menular
- Peningkatan Imunisasi
- Pencegahan penularan penyakit endemik dan epidemik
- Pengadaan bubuk abate SG 1 %
- Penyusunan standar pelayanan kesehatan
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan kesehatan

## **11 Terciptanya Peningkatan Kapasitas dan Kemandirian Masyarakat di Bidang Ekonomi**

Indikator keberhasilan terciptanya peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat di bidang ekonomi dengan target dan sasaran yang dapat digambarkan sebagai berikut :

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SAT.</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
- Terciptanya persaingan/iklim usaha yang kondusif	Paket	1	1	100
- Terciptanya pengembangan kewirausahaan	Paket	1	1	100
- Terlaksananya promosi bagi pengembangan investasi	Paket	1	1	100
- Terciptanya peningkatan ketahanan pangan	Paket	1	1	100
- Terwujudnya pengembangan industri dan perdagangan	Paket	1	1	100

Pemerintah Kota Ambon dalam mewujudkan indikator sasaran tersebut diupayakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah  
1 Paket
- Penyusunan Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah 1 paket
- Identifikasi dan inventarisasi data usaha mikro usaha kecil dan menengah
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan komperatif usaha kecil menengah
- Pendidikan dan pelatihan manajemen pengelolaan simpan pinjam KSP/USP
- Pemantauan dan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha kecil menengah
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
- Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
- Pengembangan potensi unggulan daerah
- Penyelenggaraan pameran Expo 1 Paket
- Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal (KP3MR) 1 paket
- Pameran Expo produk unggulan dan potensi 1 paket
- Peningkatan pangan dan holtikultura
- Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak  
1 Paket
- Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 1 paket
- Pembangunan tempat pelelangan ikan 1 paket
- Pengadaan alat tangkap Gill Net 1 unit
- Pengadaan keramba bagan apung 1 unit

- Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
- Pengawasan operasionalisasi kemetrolagian
- Peningkatan pengawasan terpadu terhadap barang berbahaya dan minuman beralkohol
- Lanjutan pembangunan pasar komoditi daerah (pasar Oleh-Oleh)
- Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

### **C. ANALISIS ATAS CAPAIAN KEUANGAN 2010**

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kinerja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2010, maka kinerja aspek finansial terkait dengan anggaran rutin dan pembangunan perlu dilakukan pengukuran, evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerjanya.

Pada kesempatan ini kami hanya dapat menampilkan pengukuran dan analisis kinerja keuangan secara umum terkait dengan pendapatan dan belanja dan pembiayaan Tahun 2010. Untuk Target Anggaran Pendapatan direncanakan sebesar Rp. 573.079.020.172,- namun sampai dengan akhir Desember hanya terealisasi sebesar Rp, 564.872.992.693,68,- atau 98,57 %. Dengan perincian sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah, realisasi sebesar

Rp.35.256.192.162,68,- atau 82,22%-, terdiri dari: (a) Pajak

daerah sebesar Rp.18.394.788.491,40,- atau 76,47%, (b)

Retribusi daerah sebesar Rp.13.846.985.721,83,- atau 89,90%,

(c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan peningkatan komponen Pajak Bumi dan Bangunan yang mencapai Rp.19.693.792.538.00,- mengalami penurunan sebesar 98,53 % dari target Rp.19.988.545.576.00.- dan komponen Dana Perimbangan mencapai Rp.430.906.090.459.00, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah yang hanya diperoleh dari dana bagi hasil pajak Provinsi dan



Pemerintah daerah lainnya melalui berbagai pendekatan koordinasi, sumber penerimaan ini dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah sebesar Rp.17.364.228.853.64.- atau naik sebesar 114,54 % dari rencana APBD sebesar Rp.15.160.000.000.00.-

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah didorong oleh upaya-upaya Pemerintah Kota melalui upaya peningkatan Koordinasi, Pembinaan masyarakat, Regulasi, Penagihan langsung pokok pajak dan Retribusi maupun tunggakan, Pemantauan SPPT PBB dan Operasi sisir (door to door) dan sebagainya. Sedangkan dari sisi Komponen Dana Perimbangan terkait dengan bagi hasil pajak dan bukan pajak senantiasa dilakukan optimalisasi penerimaan yang melalui pungutan langsung maupun koordinasi efisien dan efektif terhadap unit-unit penghasil, begitu pula koordinasi dilakukan terkait dengan alokasi DAU dan DAK.

Dari sisi belanja ditargetkan anggaran sebesar Rp. 650.406.134.225.00.- terealisasi hanya mencapai Rp. 592.803.899.700.16 atau 91,14 %. Realisasi belanja tersebut meliputi :

a. Belanja tidak langsung yang dianggarkan sebesar Rp.356.882.093.130.00,- realisasi mencapai Rp.351.287.797.719.01.-atau 98,43 % yang terdiri dari :

1. Belanja pegawai diperuntukan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan, biaya penunjang operasional dan tunjangan komunikasi insentif serta biaya pungutan pajak daerah dianggarkan sebesar Rp.327.212.082.717.00.- dengan realisasi sebesar Rp.324.955.557.524.24.- atau 99,31 %.

2. Belanja subsidi yang dianggarkan sebesar Rp.4.041.471.689.00, realisasi mencapai mencapai Rp.3.987.316.713.00 atau 98,66 % sementara belanja hibah dianggarkan sebesar Rp.4.156.007.586.00, realisasi mencapai Rp.2.836.441.442.00.- atau 68,25 %, bantuan sosial dianggarkan dalam bentuk bantuan yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di Kota Ambon termasuk bantuan kepada Partai Politik dianggarkan sebesar Rp.8.385.506.000.00.- dengan realisasi sebesar Rp.6.416.918.624.00.- atau 76,52 %.
  3. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa dan bantuan pemilihan kepala desa dianggarkan sebesar Rp.2.658.800.000.- realisasi sebesar Rp2.424.240.000.000.- atau 91,18 %.
  4. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di Kota Ambon dan untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial serta termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dan dapat didukung dengan bukti-bukti yang sah dianggarkan sebesar Rp.10.328.225.138.00.- dengan realisasi sebesar Rp.10.284.843.138.00.- atau 99,58 %.
- b. Belanja langsung yang dianggarkan sebesar Rp.293.524.041.095.00.- dengan realisasi sebesar Rp.241.516.101.981.15.- atau 82,28 %. Yakni terdiri dari :

1. Belanja Pegawai diperuntukan untuk Honorarium Non PNS berupa tenaga ahli/instruktur dan nara sumber, uang lembur, beasiswa pendidikan, kursus pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kota Ambon dianggarkan sebesar Rp.14.041.897.447.00.- realisasi sebesar Rp.7.915.404.900.00.- atau 56,37 %.
2. Belanja Barang dan Jasa diperuntukan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan seperti bahan pakai habis, material, jasa kantor, premi asuransi kesehatan, pemeliharaan, cetak penggandaan, sewa, makan minum, pakaian dinas dan perjalanan dinas, dianggarkan sebesar Rp.99.840.463.300.00.- realisasi sebesar Rp.79.258.120.069.00.- atau 79,38 %.
3. Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk dipergunakan dalam kegiatan pemerintahan dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp.179.641.680.348.00.- dengan realisasi sebesar Rp.154.342.577.012.15.- atau 85,92 %.

Kondisi ini tercipta karena adanya kebijakan penghematan, efisiensi anggaran sesuai kebutuhan.

Gambaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada laporan ini masih bersifat sementara artinya belum merupakan angka realisasi APBD karena pada saat penyusunan LAKIP ini, Pemerintah Kota

Ambon belum melakukan pembahasan dengan DPRD Kota Ambon terkait dengan Perhitungan APBD Kota Ambon Tahun 2009.

### Gambaran Umum Kinerja Keuangan

#### Tahun 2009

Uraian		Anggaran	Realisasi	Berlebih ( kurang )	%
<b>PENDAPATAN</b>	Rp	517.811.787.973	527.672.282.869.06	(9.860.494.896.06)	101,90
- PAD	Rp	37.240.231.514	31.479.136.242.42	(5.761.095.271.58)	84,53
- Dana Perimbangan	Rp	430.906.090.459	441.956.610.954	(11.050.520.495)	102,56
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp	13.346.478.780	5.311.190.467.27	(8.035.288.312.73)	39,79

<b>BELANJA</b>	Rp	650.406.134.225	592.803.899.700.16	57.602.234.524.84	91,14
- Belanja Tidak Langsung	Rp	356.882.093.130	351.287.797.719.01	5.594.295.410.99	98,43
- Belanja Langsung	Rp	293.524.041.095	241.516.101.981.15	52.007.939.113.85	82,28

<b>PEMBIAYAAN</b>	Rp	132.594.346.252	72.891.869.388.90	59.702.476.863.10	54,97
- Pembiayaan Penerimaan	Rp	132.844.346.252	78.141.869.388.90	54.702.476.863.10	58,82
- Pembiayaan Pengeluaran	Rp	250.000.000.00	5.250.000.000.00	5.000.000.000.00-	2100

# BAB IV

## PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2009, yakni :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diamanatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Walikota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana yang telah dipersyaratkan pada pasal 27 ayat b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
3. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban seperti yang disebutkan pada point 1 dan point 2 diperoleh dari laporan kinerja masing-masing unsur terkait yang melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran stratejik, dari 577 kegiatan yang dilaksanakan mewujudkan hasil yang sangat memadai dengan rata-rata realisasi baik fisik maupun anggaran mencapai 100 %.
4. Adapun pencapaian realisasi 100 % dimaksud umumnya baru dapat diukur pada indikator output dan outcome.
5. Dari sasaran yang tercapai tersebut, sudah sesuai dengan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat. Hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ini adalah pada tingkat hasil (outcome).

6. Untuk diketahui bersama bahwa sebagian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2009 berbeda dengan program di tahun 2008, hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kota Ambon menggunakan pendekatan isu, sehingga apabila isu tersebut berubah maka program yang dibuat akan disesuaikan dengan isu tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa isu pokok untuk tahun 2008 berbeda dengan isu yang diangkat pada tahun 2009.
7. Angka realisasi keuangan yang digunakan dalam penyusunan LAKIP tahun 2009 adalah angka sementara artinya belum merupakan angka realisasi APBD karena pada saat penyusunan LAKIP ini APBD tahun 2009 belum diadakan perhitungan.